PERAN KEPALA DISTRIK DALAM PENGELOLAAN DANA KAMPUNG DI DISTRIK METEMANI KABUPATEN SORONG SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sorong Untuk Memenuhi
Sebagai Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Disusun oleh :

GERSON KAWAINE
NIM :20193622107

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG
2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh para pembimbing dan diterima, untuk diajukan kepada Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sorong untuk memenuhi syarat guna ujian skripsi pada program studi ilmu Administrasi Negara

PEMBIMBING I

Drs. SATTU, M. Si.
NIDN: 1231126201

PEMBIMBING II

ISGAR M.R. TUMOKA,S. Sos.,M.Si.
NIDN : 1409129002

Mengetahui
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ARIF PURNOMO,S.IP,M.Si
NIDN: 1217018201

HALAMAN PENGESAHAN

Diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Universitas Muhammadiyah Sorong berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sorong Nomor : 350/KEP/II.3.AU/III.1/A/2023 Tanggal 14 Juni 2023 untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sorong dalam Lingkup Koordinasi LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

DEWAN PENGUJI :

1. Dr. H. MUHAMMAD ALI, MM, MH (.....)
2. RUSDI, S.Sos, M.Si (.....)
3. ASWAD MUHDAR, S.IP, M.Si (.....)
4. ISGAR M. RICKY TUMOKA, S.Sos, M.Si (.....)

Tanggal, 14 Juli 2023

KETUA,	SEKRETARIS,
USWATUL MARDLIYAH, S.Sos, M.Si	**SITI NURUL NIKMATUL ULA, SE, M.Si**
NIDN. 1223128301	**NIDN. 1429078601**

HALAMAN KEASLIAN NASKAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GERSON KAWAINE

Nim : 20193622107

Program : Ilmu Administrasi Negara

Judul : PERAN KEPALA DISTRIK DALAM PENGELOLAAN DANA KAMPUNG DI DISTRIK METEMANI KABUPATEN SORONG SELATAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis adalah benar hasil karya sendiri, dengan arahan Pembimbing I dan Pembimbing II, dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai atau keseluruh Skripsi ini adalah hasil karya orang lain maka, saya bersedia menerima segala konsekwensi atau saksi sesuai aturan yang berlaku:

Adapun karya ini diajukan untuk mendapatkan gelar di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Sorong.

Sorong 14 Juni 2023

MOTTO

Jangan tuntut Tuhanmu

karena tertundanya

keinginanmu, tapi tuntutlah

dirimu karena menunda

adabmu kepada Tuhan

PERSEMBAHAN

1. Untuk Almamater Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN).
2. Kupersembahkan karyaku ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka,
3. Kupersembahkan Karya Ku Ini Kepada Bapak, Mama, Kaka-Kaka Dan Adik-Adik Ku Yang Di Kampung Puragi Tawanggire Dan Juga Di Luar Kampung Yang Tercinta Dan Juga Di Luar Kampung Puragi Tawanggire Yang Tercinta
4. Kupersembahkan karya ku ini, kepada teman-teman SD SMP SMK dan teman-teman banku perguruan tinggi yang senantiasa ada saat suka maupun duka, namun kalian selalu setia mendampingi ku saat kulemah dan tak berdaya terima kasih buat segalanya.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya dan karunianya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul: **PERAN KEPALA DISTRIK DALAM PENGELOLAAN DANA KAMPUNG DI DISTRIK METEMANI KABUPATEN SORONG SELATAN**

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan ini sebagai salah satu syarat akhir akademik guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sorong.

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis banyak kendala yang dihadapi akan tetapi berkat bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada : telah mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan

skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu perkenankanlah penulis pada kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak, DR. H. MUHAMMAD ALI, MM, MH Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, yang telah membimbing saya dari awal perkuliahan hingga berakhirnya masa perkuliahan.
2. Bapak, ARIE PURNOMO,S. IP, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sorong

3. Ibu Ana Lestari, S.AN., M.,Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara yang memberikan petunjuk dan arahan bagi Penulis untuk penyusunan Proposal
4. Bapak Drs. SATTU, M. Si. selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis kami untuk menyelesaikan studi ini.
5. Bapak ISGAR MUHAMMAD RICKY TUMOKA, S.Sos,M.Si. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi petunjuk dan arahan yang sangat berguna sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sorong, yang telah memberikan ilmu semenjak awal perkuliahan hingga menjelang berakhirnya masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu, selaku orang tua penulis yang telah membantu dan memberikan motivasi yang sangat besar terhadap penulis.

   Keluarga besar dan pihak keluarga dari pihak penulis yang memberikan dorongan dan motivasi.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan memberikan masukan bagi kesempurnaan penelitian ini dikemudian hari.

Sorong, 13 Maret 2023

PENULIS

ABSTRAK

Gerson Kawaine, Peran Kepala Distrik Dalam Pengelolaan Dana Kampung Di Distrik Kabupaten Sorong Selatan (Di bombing oleh Sattu dan Isgar M.R Tumoka)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, proses pengelolaan dana kampung tahun 2023 di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan kesesuaian antara pengelolaan dana kampung dengan pereturan menteri dalam negeri no. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa/kampung, serta untuk mengetahui menfaat dana desa/kampung dan hambatan selama proses pengelolaan dana desa/kampung di Distrik Metemani. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi berupa membandingkan data hasil wawancara dengan data sekunder penelitian. Analisis data menggunakan deskriptif evaluative dengan tiga langkah berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan

Hasil penelitian menunjukan bahwa. Pengelolaan alokasi dana kampung dalam pemberdayaan masyarakat kampung yang di distrik metemani kabupaten sorong selatan secara normatif dan administratif sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, bertanggungjawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut. Peran kepala Distrik pada pengelolaan alokasi dana kampung dalam pemberdayaan masyarakat kampung-kampung masih belum maksimal. Hanya kepada kampung yang terlibat aktif dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana kampung mulai dari perencanaan, makasnisme penyeluran dari pencairan dana, pelaksanaan, pengawasan.

Kata kunci : Peran Kepala Distrik, Dalam Pengelolaan Dana Desa Kampung

ABSTRACT

The role of the Districk head in managing village-village funds in the Metemani Districk of south Sorong Districk quided by Sattu and Isgar M.r Tumoka.

This study aims to fing out the village fund management process in 2023 in the Metemani Distrik, South Sorong Regency. Conformity between the management of Home Affairs Regulation no. 113 of 2014 concerning village-village financial management and to find out the benefits of village-village funds. And obstacles during the village-village funds management process in the Metemani district. This study uses qulialitative research. data collection techniques were carried out by interviews, observation and documentation, researchers tested the validity of the data using a triangulatiom technique in the form of comparing interview data with data secondary research data analysis using descriptive evaluative with three steps in the form of data reduction, data presentation and withdrawal

The results of the study show that the management of village fund allocations in empowering village communities in Metemani Distrik, South Sorong Regency, is normative and administravely good. But in substance threre are several things that must be improved, namely community participation in the planning, monitoring, accountability, and transparency stages which has been maximized because the community does not know much about the existence of these activities. The role of the district head in managing vollage fund allocation in community empowerment in the village is still not maximal, only for village that are actively involved in every atage of village fund allocation management atrating form planning, the disbursement mechanism of disbursing village funds lacks implementation of management and supervision

Keywords: Managinge Of Village Fund Managemet

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN KEASLIAN NASKAH..... iii

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK x

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR..... xiv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Sistematika Penulisan ..... 6[

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7

A. Peran 7

B. Pembangunan 9

C. Strategi 12

D. Pengelolaan..... 15

E. Manajemen 19

F. Organisasi 22

G. Karangka Pikiran 27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 28

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... 28

B. Tempat dan Waktu Penelitian..... 28

C. Penentuan Informan..... 28

D. Teknik Pengumpulan Data 29

E.Teknik Analisis Data 31

F. Keabsahan Data 33

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

BAB V HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN 62

Hasil Dan Analisis Pembahasan

BAB VI PENUTUP 87

A. Kesimpulan 87

B. Saran.....87

DAFTAR PUSTAKA.....89

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Persentase Luas Wilayah Distrik Metemani Kabupaten sorong selatan 47

Tabel 4.2 Batas Wilayah Distrik Metemani 47

Tabal 4.3 ibukota kampung dan ketinggian permukaan laut di Distrk Metemani .. 48

Tabal 4.4 Jumlah Pegawai Distrik Menurut Status Kepegaaian distrik metemani ..50

Tabel 4.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Distrik Metemani 50

Tabel 4.6 Status Desa/Kampung Distrik Metemani.....50

Tabel 4.7 Banyaknya Satuan Lingkungan Setempat menurut kampung di Distrik Metemani 51

Tabal 4.8 Jumlah penduduk menurut umur berdasarkan jenis kelamin distrik metemani 54

Tabel 4.9 Proyeksi kepadatan rumah tangga menurut kampung 54

Tabel 4.10 Banyaknya sekolah menurut jenis sekolah 58

Tabel 4.11 Banyaknya rumah sakit puskesmas puskesmas 58

Tabel 4.12 Jumlah tenaga medis kesehatan 59

Tabel 4.13 Banyaknya tempat ibadah 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Karangka Pikir.....27

Gambar 4. 1 Struktur Distrik Metemani 37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Peran kepala Distrik sangat strategis dalam Pengelolaan Dana Kampung baik selaku skpd yang paling dekat dengan kampung, maupun selaku skpd yang secara khusus ditugas oleh PP dan permendargi untuk melaksanakan penyelenggara dan pengawasan maupun pengelolaan dana kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan. Karena kurang adanya Pengawasan dari pemerintah Distrik maka sampai saat ini masyarakat yang ada di kampung-kampung di Distrik metemani belum sejahtara dari Dana Kampung yang di berikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang biasanya di cairkan oleh kepala-kepala kampung setiap tahun maka harus adanya pengelolaan dan pengawasan dari pemeintah distrik agar Dana Kampung yang di berikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat kampung.

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan kampung secara mandiri oleh kampung yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana kampung (ADD). Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Alokasi dana kampung adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk kampung yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kebupaten/kota.

Alokasi dana kampung sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah kampung. dalam perkembangannya, kini kampung

telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi kampung yang mendiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kampung memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasanya sesuai kemampuan dan potensi yang dimilik masyarakatnya agar tercapai kesejahtaraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan kampung harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila sila dalam pencasilan demi mewujudkan masyarakat kampung yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan kampung harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengatahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan kampung.

Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah kampung dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Kampung (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambilan keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat Kampung, pengelolaan alokasi dana Kampung yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya maka perlu adanya penerapan fungsi–fungsi menajemen pada setiap proses pengelolaan. Pengelolaan ADD di Dana Kampung yang ada di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan. Dan dana kampung akan Berdampak baik/positif bagi masyarakat yang di distrik metemani. Pengawasan adalah salah satu jalan akternatif yang baik untuk menjaga

agar Dana Kampung yang di cairkan oleh kepala-kepala kampung bisa berguna dan berdampat positif bagi pembangunan masyarakat yang di Distrik Metemani Dan juga dana kampung biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan transfortasi laut biasanya di sewakan lombot untuk pulang balik kota dengan membayar transfortasi laut sebesar Rp, 12 juta pulang balik ke kota dan kampung. Dan kegiatan-kegiatan lainnya kampung-kampung.

Di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan memiliki banyak penduduk mencapai tiga ribu delapan ratus enam puluh dua jiwa, dan distrik metemani terdiri dari 6 kampung antara lain kampung Mugim Nusa Saga Puragi Tawanggire dan terakhir kampung Bedare, dan ibu kota distrik metemani terletak pada dua kampung yaitu Mugim dan Nusa perjalanan ke ibu kota kabupaten mengunakan transfortasi laut yang digunakan antara lain kapal, sipit, lombot dan perahu, biasanya dari distrik metemani ke Ibu Kota Kabupaten Maksimal 5 – 7 jam perjalanan baru biasa tiba di Ibu Kota Kabupaten.

Kampung-kampung di Distrik Metemani sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perkampungan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah kampung terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan kampung tersebut. bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewanangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan

sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahtaraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Masih terdapat permasalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan pengelolaan dana Kampung yang di Distrik Metemani kabupaten sorong selatan.

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan Kampung, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap kampung diberikan Alokasi Dana Kampung (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan kampung-kampung di distrik metemani tersebut. berdasarkan dari data APBKam, jumlah Dana (ADD) yang ada di setiap kampung-kampung di distrik metemani yaitu setiap tahun Rp, 8.74.3.21.000 juta lebih pada setiap kampung yang di distrik metemani.

Dalam beberapa situasi penggunaan Alokasi dana kampung ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercayai oleh masyarakat dalam membangun Kampung menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran kepala distrik dan masyarakat sebagai pengawas lengsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di Kampung-Kampung. karena sebagian besar Alokasi dana kampung diperuntukan bagi pembangunan kampung maka mulai dari proses perencanaan ADD, pengelolaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masayarakat kampung-kampung yang di Distrik Metemani.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. bagaimana peran kepala Distrik Metemani dalam pengelolaan Dana Kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui Peran Kepala Distrik dalam Pengelolaan Dana Kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

   Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa, peniliti atau mereka yang konsen terhadap ide atau pemikiran tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kampung.

2. Bagi pemerintah

   Diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan bertanggung jawaban sehingga dapat meningkatkan pembangunan di Kampung-Kampung di Distrik Metemani agar lebih efektif dan efisien.

E. Sistematika Penulisan

Secara Garis Besar Penulisan Ini Akan Di Paparkan Dalam Tiga Pokok Pembahasan Bab Dari Masing-Masing Bab Ini Di Bagi Dalam Beberapa Sub-Sub, Sebagai Berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**, Berisi Tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II TUNJAUAN PUSTAKA

Berisi Tentang Teori, Dan Karangka Pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi Tentang Jenis Penelitian Tempat Dan Waktu Penelitian, Populasi Dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Serta Teknik Analisis Data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN,

BAB V HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

BAB VI PENUTUP

Bab Ini Menjeleaskan Tentang Kesimpulan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan

1. Pengertian peranan

Peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Peran kepemimpinan dapat diartikan seperangkat perilaku yang diharapkan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. (Rivai,2003:148) Suatu peranan diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat. Alasan seperti ini teori administrasi publik lebih menekankan pada program aksi yang berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga eksistensi administrasi publik tidak hanya sekedar lukisan saja melainkan adanya manfaat bagi kepentingan publik untuk mencapai tujuan. Miftah Thohah (dalam buku harbani pasolong, 2005:53)

Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, artinya tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh pemerintah sebagai aparatur pelaksanan penegak peraturan dalam bidang pemerintah daerah haruslah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku (Rivai, 2004:148).

Maksud dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang

berluku, yaitu meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam penanggulangan dan mengantasipasi permasalahan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah memiliki paran yang sangat besar dalam menanggulangi angka kemiskinan yang timbul agar proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Rivai (2003:150) agar pemimpin tersebut dapat berperan perlu diperhatikan hal berikut ini:

a. Bahwa yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan seseorang bukan pengangkatan atau penunjukkan selaku kepala, akan tetapi penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan.
b. Efektivitas kepemimpinan tercermin ari kemampuan untuk tumbuh dan berkembang.
c. Efektivitas kepmimpinan menuntutkemahiran untuk membaca situasi.
d. Perilaku seseorang tidak terbentuk bagitu saja, melainkan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan.
e. Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota mau menyesuaikan cara berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Talizudulu Ndraha (2005: 5) bahwa fungsi kepada desa/kelurahan sebagai administrator adalah :

1. Mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa/kelurahan.
2. Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam pelaksanaan

pembangunan.

3. Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan.
4. Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan.
5. Mampu mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan desa kelurahan.

B. Kepemimpinan

Istilah kepemimpinan berasal dari bahasa inggris *leadership* berasal dari kata dasar pimpin yang artinya bombing atau tuntunan. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja memimpin, membimbing, dan menuntun. Pemimpin akan timbul dari kelompok-kelompok yang sama sekali yang tidak teroganisir, namun kepemimpinan merupakan kemampuan untuk memimpin secara efektif yang merupaka salah satu kunci untuk menjadi pemimpin yang efektif. (Isyadi, 2004: 148). Sedangkan menurut KADARMAN (2001 :143) adalah suatu proses untuk mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berhubungan dengan penugasan anggota organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau kelompok.

Menurut rivai (2006:2) Kepemimpinan adalah secara luas mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengingkat untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.

Pemimpin adalah teladan yang bagi para bawahan yang ada di sebuah perusahaan. Pemimpin tidak hanya dituntut untuk bisa mempengaruhi, pintar, memiliki pengalaman yang luas dan lain sebagainya. Tetapi juga harus mampu memainkan peran-peran penting dalam suatu kondisi di organisasi atau perusahaan. (Handoko,

2003:297)

Jenis jenis kepemimpinan dalam prakteknya, gaya kepemimpinan sangat bervariasi menurut rivai (2004: 78-79) antaranya adalah :

1. Otoktrat.
    a. Kurang mempercayai anggota kelompoknya.
    b. Kurang adanya toleransi terhadap kesalahan yang dilakukan anggota kelompok.
2. Otorite.
    a. Kurang perhatian kepada kelompoknya.
    b. Senantiasa membuat keputusan sendiri.
    c. Peka terhadap perbedaan kekuasaan.
    d. Mendengarkan pendapat kelompoknya semata-mata untuk menyenangkan hati kelompoknya saja.
    e. Hanya dengan imbalan materi sajalah yang mendorong orang untuk bertidak.
3. Laissez-Faire.
    a. Tidak yakin dengan kemampuan sendiri.
    b. Tidak berani menetapkan tujuan untuk kelompok.
    c. Tidak berani mengambil resiko.
    d. Membatasi komunikasi dan hubungan kelompok.
4. Democrat.
    a. Membuat keputusan bersama dengan anggota kelompok
    b. Mengkritik dan memuji secara objektif
    c. Selalu menjelaskan sebab keputusan yang dibuat sendiri kepada kelompok

d. Feed back di jadikan sebagai salah satu masukan yang berharga

Kaloh 2003: 10) sebagai berikut:

1. Kepemimpinan adalah sesuatu yang semestinya melekat pada seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu kepribadian, kemampuan dan kesanggupan.
2. Kepemimpinan adalah serangkaian kegiatan pemimpin yang terkait dengan kedudukan serta gaya atau sendiri.
3. Kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau interaksi antara kepemimpinan, bawahan dan situasi.

Menurut Stone dan Sach (dalam J. Kaloh,2003: 12) ada 4 hal strategi yang dilakukan pemimpin dalam memimpi organisasi sebagai berikut:

1. Menciptakan lingkungan pelatihan.
2. Memperdayakan anggota organisasi.
3. Membuka diri terhadap perkembangan dan muidah menyesuaikan diri dengan perkembangan.
4. Mengupayakan agar visi, misi, dan nilai-nilai organisasi menjadi milik anggota organisasi.

Chales J. Keating (dalam Harbani Pasolong 2013: 116), mengatakan bahwa tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kelompok yaitu :

1. Memulai yaitu usaha agar kelompok mulai kegiatan atau garakan tertentu.
2. Mengatur, yaitu tindakan untuk mengatur arah dan langkah kegiatan kelompok.
3. Memberitahu, yaitu kegiatan memberi informasi, data, fakta dan pendapat yang diperlukan
4. Mendukung, yaitu usaha untuk menerima gagasan, pendapat, usul dari bawahan

dan menyempurnakannya dengan menambah atau mengurangi untuk digunakan dalam rangka penyelesaian tugas bersama.

5. Menilai, yaitu tindakan untuk menguji gagasan yang muncul atau cara kerja yang diambil dalam menunjukkan konskuensi dan untung ruginya
6. Menyimpulkan, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan dan merumuskan gagasan pendapat dan usul yang muncul, menyingkat lalu menyimpulkan sebagai landasan untuk memikirkan lebih lanjut.

Menurut Kartini Kartono (2006:94) Asas-asas kepemimpinan ialah:

a. Kemanusiaan, mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan, yaitu pembimbingan manusia oleh manusia, untuk mengembangkan potensi dan kemampuan setiap individu demi tujuan-tujuan human.
b. Efisien, efisiensi teknis maupun sosial berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber, materi, dan jumlah manusia atas prinsip penghematan, adanya nilai-nilai ekonomi serta asas-asas manajemen modern.
c. Kesejahteraan dan kebahagian yang lebih merata, menuju pada taraf kehidupan yang lebih tinggi.

C. Strategi

1. Strategi

Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Berkaitan dengan strategi pembangunan, hasil penelitian Rizki Rahajuning Tyas (2006) yang berjudul "Strategi Pembangunan Wilayah Kabupaten Situbundo, Provinsi Jawa Timur" secara umum keberadaan dan kelengkapan sarana dan

prasarana pembangunan di wilayah kabupaten Situbundo termasuk mamdai, tetapi akses masyarakat terhadap sarana dan prasaran tersebut masih sangat terbatas terutama untuk masyarakat pedesaan.

Hasil penelitian lainya yang dilakukan oleh Ummi Nurul Hidayah (2018) yang berjudul "Analisis Strategi Program Pembangunan Desa Dalam Penggentasan Kemiskinan Prespektif Ekonomi Islam (studi kasus desa Tambakbulusun, kecamatan karangtengah Demak)" pembangunan desa merupakan bagian penting dlam pembangunan nasional.

Namun, persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi fakto yang menghalangi proses pembangunan desa. Untuk upaya menanggulangi kemiskinan dedi adakan beberapa program yaitu memberi ketrampilan, kerajinan dalam membentuk perekonomian pedesaan. Di desa Tambabulusan, kecamatan Karang tengah Demak,perekonomiannya masih taraf rendah dalam penghasilan penduduknya rata-rata pekerjaan masyarakat adalah bertani, betarnak, dan ada juga yang menjadi buruh di daerah berkembang. Malihat kondisi tersebut pemerintah desa Tambakbulusun melakukan upaya mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, apabila di kaitkan dengan rencana penelitian ini terdapat beberapa kesamaan antara lain strategi pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Sedangkan perbedaan rencana penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian ini lebih fokus kepada strategi pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraaan petani di Desa Polo, kecamatan Amanuban Selatan kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Strategi pembangunan merupakan suatu cara untuk mencapai visi dan misi yang di

rumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Kinerja sengat di pengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi (pemerintah) menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Kertasasmita (1996) pembangunan adalah usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. Di mulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, di harapkan akan dapat memacu partispasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Hakekat dari pembaangunan adalam dari dan untuk seluruh rakyat. Dengan demikian dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang di tuju harus melibatkan dan pada gilirannya dapat di nikmati oelh segenap lapisan masyarakat. Tuntutan ini sesungguhnya bertetapan atau sesuai dengan konsep pembangunan yang berkesinambungan apabila ekonomi rakyat berkembang.

Dengan perekonomian yang lebih luas (tidak berpusat pada perorangan, sekelompok orang, atau perusahaan tertentu), ketahanan perekonomian nasional terhadap goncangan-goncangan ekonomi eksternal dan internal menjadi lebih kuuh. Inti dari semua ini adalah pentingnya untuk mengembangkan ekonomi rakyat sesuai dengan amanat rakyat dalam GBHN, dan sekaligus mengamankan keberlangsungan pembangunan nasional. Posisi penting pembangunan ekonomi rakyat bagi pembangunan yang berkelanjutan menunjukan adanya keterpaduan antara pemerataan dan pertumbuhan.

D. Pengawasan

1`Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menujukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oelh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadapa pelaksanaan pekerjaan atau pagawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Dengan demikian, pengawasan oleh pemimpin khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam peleksanakan pekerjaan tergatung pada tingkat kemampuan dan keterambilan pegawai. Para pagawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cerderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebu:

1. Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang lebih ditentukan.

2. Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sitematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.
3. Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudnya visi dan misi organisasi.
4. Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control)* sebagai berikut. "*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*".

   Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.

   Jelasnya pengawasan harus berpedoman terdapat hal-hal berikut:

a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (Performance
c. Tujuan
d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi diata disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

Metode Pengawasan

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan? pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektik, verifikasi, maupun dengan sistem investigative. Metode ini dimasudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut built in control.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersbut dapat berupan uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaranatas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

c. Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan yang bertindakan atas nama pimpinan organisasinya atau

atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hibungan, dan tata kerja.

d. Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biayanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan

Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usu/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas

e. Pengawasan Administrasi

Pengawasan Administrasi adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos anggaran (rencnana anggaran) pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang. Pengawasan kepegawaian menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta

menyangkut terhadap hak-hak mereka yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitas-fasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barang-barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya,

E. Manajemen

1. Manajemen

Pengertian manajemen adalah ilmu dan seni? mengatus proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efesiensi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia berkerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh sebab itu menajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganilisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Pada hakekatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur (*managing*) untuk mengatur disini diperlukan suatuseni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

Pengertian manajemen adalah suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perecanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi daan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi/ perusahaan, baik sumberdaya manusia (human resource capital). Modal (financial capital), material (land, natural resource or raw materials), maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan.

Adanya kebutuhan Negara untuk, yakni mengatur persoalan hidup rakyat dan

memberikan pelayanan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini tidak berarti bahwa manajemen belum dikenal sebelumnya, atau perkembangan manajemen terkait dengan perkembangan masyarakat Amerika dan Eropa. Kelahiran dan perkembangan manajemen bisa dikembalikan pada awal proses penciptaan alam ini. Jika kita menilik peradaban Mesir Klasik, terdapat bukti sejarah merupakan piramida dan spinx yang mencerminkan adanya praktik manajemen, skill, dan kompetensi. Manajemen selalu dipakai dan sangat penting untuk mengatur semua kegiatan dalam rumah tangga, sekolah, koperasi, yayasan-yayasan, pemerintahan dan lain sebagainya. Manajemen sebagai suatu ilmu dan sini.

Mengapa disebut demikian, Sebab antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan, karena telah dipelajari sejak lama, dan telah diorganisasikan menjadi suatu teori. Hal ini direncanakan didalamnya menjelaskan tentang gajala-gejala manajemen, gejala-gejala ini lalu diteliti dengan menggunakan metode ilmiah yang dirumuskan dalam bentuk prinsip-prinsip yang diwujudkan dalam bentuk suatu teori. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni, disini memandang bahwa di dalam mencapai suatu tujuan diperlukan kerja sama dengan orang lain, bagaimana cara memerintahkan kepada orang lain agar orang lain agar mau bekerja sama. Pada hekekatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur (*managing*) untuk mengatur disini diperlukan suatu seni, bagiamana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

Secara etimologis diantaranya istilah menajemen berasal dari bahasa laitin *manus* yang berarti “tangan”. Dalam bahasa italia managgiar berarti “mengendalikan,

dalam bahasa inggris istilah manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mangatur. Sedangkan secara termonologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya:

1. Schein memberi definisi manajemen sebagai profesi. Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara professional, karakterisknya adalah para professional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para professional mendapatkan status mereka karena merekan mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para professional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.
2. Terry memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangkan kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujua-tujuan organisasi atau maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mngukur ekfetivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.
3. Uther Gulick mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusahan secara sistematik untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

   Menajemen dibutuhkan oleh individu atau kelompok individu, organisasi bisnis, organisasi sosial atau pun organisasi pemerintah untuk mengatur, merencanakan segala hal untuk memperoleh hasil yang optimal pada waktu yang akan datang. Manajemen dibutuhkan oleh semua orang, karena tanpa manajemen yang baik,

segala usaha yang dilakukan kurang berhasil.

Dalam perkembangannya proses manajemen adalah langkah-langkah strategis yang juga adalah manfaat dari manajemen tersebut. Untuk mencapai tujuan organisasi, oleh karena itu manjer perlu manjaga kesimbangan yang berbeda yaitu tuntutan *staholders* dan tuntutan pekerja.

Tiap-tiap organisasi tentunya memiliki satu atau sebagian tujuan yang memastikan arah serta menjadikan satu pendangan unsur menajemen yang ada dalam orgnisasi itu. Sudah tentunya tujuan yang mau diraih nantinya yaitu satu kondisi yang tambah baik daripada kondisi diawalnya. Dalam perkembangannya manajemen digunakan untuk mengendalikan organisasi.

Organisasi dapat diartikan sebagai suatu kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Di dalam organisasi dirasakan perlunya bekerja sama atau bantuan orang lain. Keberhasihan suatu organisasi antara lain ditentukan oleh kemampuan pemimpin, mengeatur, mengelola, mengendalikan, mengembangkan kegiatan organisasi merupakan kegiatan organisasi merupakan kegiatan organisasi merupakan kegiatan manajemen.

D**. Organisasi**

1. organisasi

Organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, oleh karna itu organisasi dapat dikatakan sebagai wadah kegiatan dari pada orang-orang yang berkerjasama dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Di kegiatan itu orang-orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, hubungan dan tata kerjanya.

Organisasi merupakan suatu karangka hubungan yang bertruktur yang

menunjukkan wewenang tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjelankan suatu fungsi tertentu. Hubungan yang bertruktur ini disebut hirarki dan konsekuensi dari hirarki ialah adanya kategori kelompok superior dengan kelompok subordinasi.

Organisasi merupakan suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk tujuan bersama. Sedangkan secara terperinci organisasi merupakan sebagai tempat atau wadah untuk orang berkumpul dan berkerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya uang, metode, material, dan lingkungan, dan sarana-prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisen dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Setiap manusia memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda, hal tersebut menjadi sebab adanya tujuan dalam organisasi, dengan menyatukan kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda untuk menjadi kepentingan dan tujuan yang sama. Tujuan organisasi berpengaruh dalam mengembangkan organisasi baik dalam perekrutan anggota, dan pencapaian apa yang ingin dilakukan dalam berjalannya organisasi tersebut.

Adanya organisasi terbentuk karena dipangaruh aspek-aspek seperti penyatuan visi dan misi serta mempunyai tujuan yang sama dengan perwujud dan eksistensi dari kelompok orang tersebut terhadap lingkungan masyarakat. Organisasi yang dianggap baik merupakan sebuah organisasi yang diakui keberadaannya, hal ini karena organisasi tersebut memberikan kontribusi. Misalanya, pengambilan sumber daya manusia sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Menurut Sudarso dan Edilius (2010:83) “Istilah Organisasi berasal dari

bahasa Yunani yaitu "*Organon*" yang dimaksudkan alat perkakas. Dengan demikian organisasi dapat diartikan sebagai suatu alat yang digunakan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan".

Menurut Kasmir dan Jakfar (2013: 180-181) "Organisasi secara statis dapat diartikan suatu wadah atau tempat kerja sama untuk melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Organisasi secara dinamis diartikan sebagai suatu proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan".

Menurut Hasibuan (2013:120) "Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi merupakan alat dan wadah saja".

Menurut Umar (2012: 128) "Secara garis besar langka-langka dalam melakukan pengorganisasian mulai dari dari merencanakan, melaksanakan dan memantau kerja organisasi".

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpilkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling berkerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi. Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang

sabagai proses, yaitu menyoroti interaksi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada.

Dalam berorganisasi masing-masing individu dapat berinteraksi dengan semua struktur organisasi yang terkait pada organisasi tersebut baik itu secara lengsung ataupun tidak langsung. Agar dapat berinteraksi dengan efektif masing-masing individu dapat berapartisipasi pada organisasi yang digabungnya. Dengan berpartisipasi masing-masing individu dapat untuk lebih mengetahui hal-hal yang harus dilakukan.

Individu yang terdapat dalam sebuah organisasi memiliki keterkaitan secara terus menerus. Rasa keterkaitan tersebut bukanlah merupakan keanggotaan seumur hidup. Namun sebaliknya, organisasi mampun untuk menghadapi adanya perubahan yang konstan dalam keanggotaan mereka, meskipun saat menjadi

anggota, masing-masing individu dalam organisasi tersebut berpartisipasi secara relative teratur.

Suatu organisasi yang ideal seharusnya memiliki tujuan. Tujuan inilah yang kemudian menjadi dasar kegiatan dari organisasi. Tanpa adanya tujuan, organisasi akan mati kerena tidak ada yang diperjuangkan. Tujuan dari sebuah organisasi harus dijelaskan dengan jela sagar kegiatan yang dilakukan berorientasi guna meraih tujuan organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya tujuan

menjadi penyemangat kerja serta komitmen bagi para anggotanya.

1. **Karangka Pikiran**

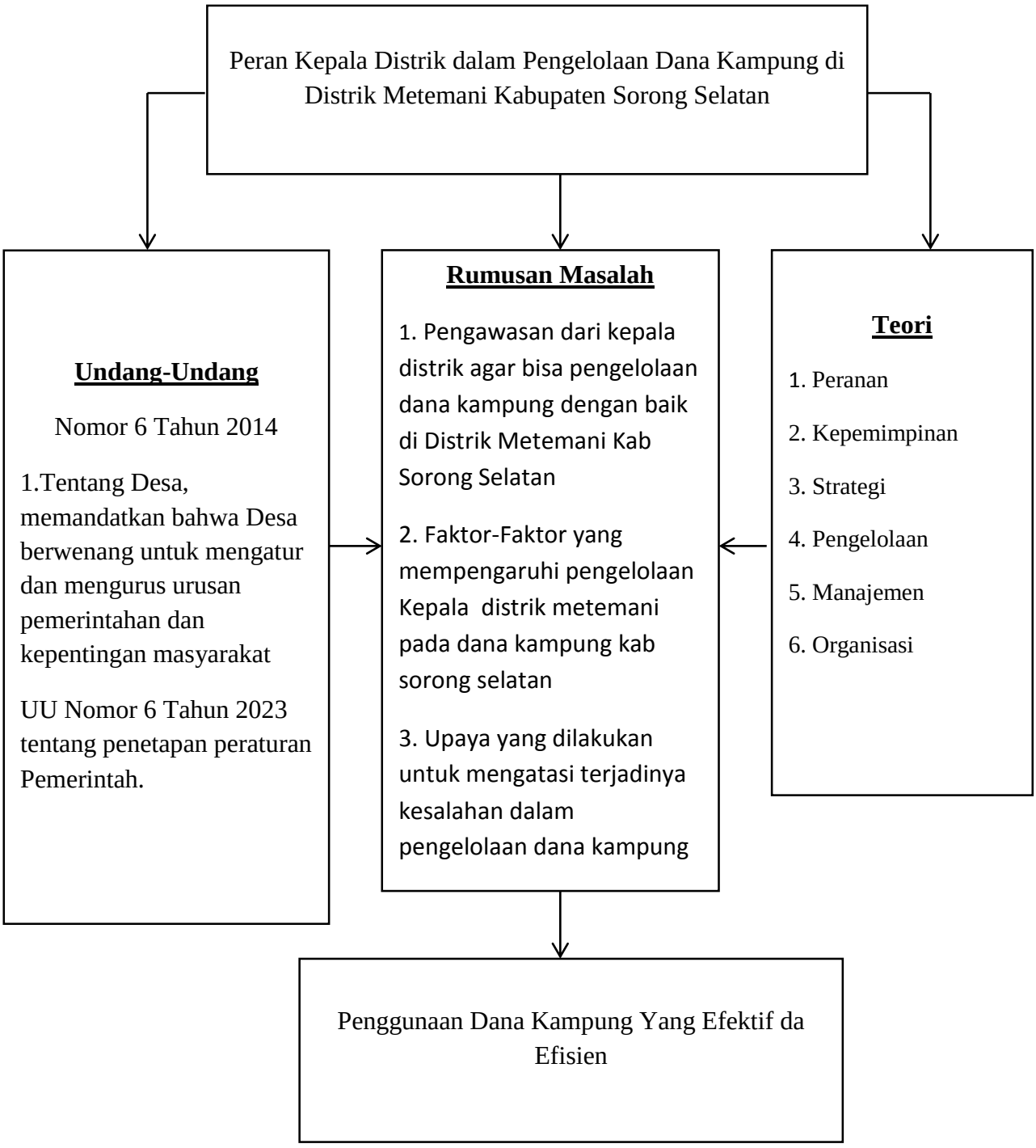

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penilitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah motode kualitatif. Berdasarkan metode yang digunakan, peniliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berupa gambaran dari jawaban informasi. Adapun pengertian metode kualitatif menurut Moleong (2007:6), mendefiniskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah. Paparan lain yang dikemukakan oleh Arikunto (2010) penelitan kualitatif adalah penelitian yang mengembangkan konsep yang didasarkan atas data yang ada, yang ditekankan pada fleksibilitas dan validitas penelitian yangdikaitkan dengan kemampuan peneliti dalam menangkap, menganalisis dan merefleksikan data.

B. **Tempat dan Waktu Penelitian**

1**. Tempat Penlitian.**

Tempat penelitian dilakukan di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya.

1. **Waktu Penelitian**

Waktu Penelitian di rencanakan 2 (dua) bulan april dan mei.

C. Penentuan Informan

Menurut Sugiyono (2007) populasi perupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi adalah objek atau subjek yang berada pada satu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti.

Populasi dalam penelitian pada Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan,

1. Kepala Distrik Metemani

Penentuan informan dalam penelitian ini yaitu dengan memperoleh data langsung dari asalnya atau subjek penelitian yang langsung memberikan datanya, berikut sumber data yang ada di dalam penelitian ini:

a. Kapala Distrik Metemani : 1 orang
b. Sekretaris Distris : 1 orang
c. Pegawai Distrik : 1 orang
d. Masyarakat : 6 orang
e. Kepala Kampung : 2 Tawanggire dan Bedare

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pendahulan (studi pralapangan), observasi partisipasi, wawacara terstruktur, dan didokumentasi. Dalam penelitian kualitatif dimungkinkan karena peneliti kualitatif merupakan penelitian yang di memiliki variasi metode termasuk hal pengumpulan data.

Dalam pengumpulan data akan digunakan metode prosedur pengumpulan data

yakni:

1. Observasi

Menurut Suharsimi (2006:156) Observasi merupakan suatu pengamatan, pendengaran, perabaan, dan pengecapan. Observasi juga merupakan pengamatan langsung, dalam artian dapat dilakukan dengan tes, kuesiner, rekaman gambar, rekaman suara.

Didalam mencapai sasaran sebagaimana dimaksud, maka observasi diperlukan secara persisten, observasion yakni observasi secara terus menerus guna menetapkan aspek penting dan kurang penting dengan mengacu pada dimensi yang dikaji, kecermatan pengamatan, dimaksudkan untuk dapat melihat gajala dalam realita kehidupan aktivitas sehari-hari.

2. Wawancara

Wawacara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyan secara langsung oleh pewancara (pengumpulan data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responder dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*). Teknik wawacara dapat digunakan pada responde yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis, termasuk anak-anak, wawacara juga dapat dilakukan dengan telpon. Menurut Surachmad (1982:165) menyatakan bahwa teknik wawacara adalah teknik yang memerlukan komunikasih atau hubungan langsung, wawacara antara penyelidikan dengan subjek yang akan diamati keterangan atau informasi.

3. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2005) studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang mendukung dalam proses penulisan. "Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada". Kama dapat disimpulkan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

4. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian tersebut atau mencari data mengenai hal-hal atau veriabel berupa catatan, transki, buku, surat kabar, majalah, prasasti, legger, notulen, rapat agenda dan lain sebagianya. (Suharsimi, 2006:158). Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak lengsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat dibedakan menjadi *dokumen primer,* jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa; dan *dokumen sekunder*, jika peristiwa dilaporankan kepada lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain.

E. Teknik Analisis Data

Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan klasifiksi jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data Primer

Pengolahan data primer dilakukan dengan data-data yang bersumber dari hasil wawacara (catatan hasil interview) yang telah ditranskripkan, selanjutnya dilakukan pengkodean untuk mengidentifikasi tema atau klasifikasi yang nantinya akan mengarahkan penelitian pada temuan atau bahkkan pengumpulan data tambahan, serta data-data pendukung lain.

b. Pengolahan Data Sekunder

Pengolahan data sekunder malalui analisis teoritis atau kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, laporan laporan, jurnal atau tulisan ilmiah dan hasil observasi di lapangan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

Prosedur pengolahan data tersebut dilakukan 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan. Yang dimaksud dengan reduksi data adalah suatu proses untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyederhanakan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikannya. Sedangkan penyajian data adalah proses penyusunan dan penyajian informasi yang diperoleh sebagai dasar pengambilan kepuyusan, selanjutnya menarik kesimpulan atas hasil penelitian yang telah diperoleh.

Adapun adat yang diperoleh melalui analisis deskripsi ini dilakukan dengan cara-cara penyajian dalam bentuk tabel dang amber sesuai dengan keberadaan data yang sesungguhnya dan tidak menggunakan uji statistic.sesuai dengan tujuan penelitian ini bersifat deskripsi dan metode yang digunakan adalah kualititatif artinya menyajikan data secara naratif yang didukung oleh data kuantitatif sesuai dengan

hasil perhitungan pada tabel dan analisis persentase. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan deskripsi yaitu menganalisis data dengan mendeskrispsikan dan menggambar data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat suatu kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

F. Keabsahan Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan pengujian terhadap keabsahan data, untuk menjamin validitas data yang akan dikumpulkan dalam suatu penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi data. Masih dari sumber yang sama Arikunto menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang digunakan dalan penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Pertama Triangulasi Sumber yaitu membendingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Kedua triangulasi metode yaitu mengumpulkan data yang sejenis dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sejenis dengan menggunakan teknik yang berbeda.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperolah melalui beberapa sumber. Observasi yang akan dilakukan oleh peniliti merupakan cara yang valid untuk melihat secara langsung Bagaimana distribusi pengendalian obat dalam di masa pademi Covid-19 dalam Prespetif *Govermmentaliti Faucalt*. Bagaimana distribusi obat dalam realisasi Govermmentality Fuucalt padamasapademi Covid-19 pada Distrik

Metemani Kabupaten Sorong Selatan Dokumentasi sebagai pendukung untuk mendapatkan data yang valid melalui catatan, rekaman, foto, dokumen dan lain sebagainya yang bersifat factual berapa pelayanan regulasi layanan, fasilitas-fasilitas lainnya, peranan tim pengarah, mudah, murah, cepat dan menfaat simple, membudayakan pemberian peleyanan yang baik, yang diberikan oleh penyelenggar layanan kepada masyarakat dalam mendistribusikan obat.

2. Triangulasi Teknik.

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Menurut Sugiyono (2013:330)" triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama, wawancara, serta dokumentasi".

Peneliti menggunakan obervasi sehingga data yang diperoleh berdasarkan pantauan atau temuan secara langsung oelh peneliti saat dilokasi penelitian dapat menjadi bukti autentik yang akan dikombinasikan dengan data-data yang diperolah baik lewat wawacara maupun dokumentasi, *instrument* yang akan digunakan dalam observasi yaitu, cacatan hasil pentauan selama penelitian.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data yang valid langsung dari *interviewer*, ataupun *instrument* yang akan diaplikasi dalam wawancara ini yaitu catatan, rekaman. Dan terakhir dokumentasi merupakan metode yang akan digunakan untuk mendukung data atau informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara sehingga dikolaborasikan untuk mendapatkan informasi yang *factual*, *instrument* yang diaplikasi pada saat dokumentasi yaitu;

kamera, dokumen yang terdapat di Distrik Metemani.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawacara di pagi hari pada saat narasumber masih, belum segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka penguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan wawacara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Distrik Metemani

Kabupaten Sorong Selatan terdiri dari 15 Distrik yang salah satunya adalah Distrik Metemani, Distrik Metemani terdiri 6 kampung yang terhampar dalam satu daratan dan sungai, dengan keanekaragaman masyarakat baik suku maupun etnis. Luas wilayah Distrik Metemani sebesar 317.32 Km2 atau 1.80 % dari luas keseluruhan Kabupaten Sorong Selatan, yakni 98.30 %, Topografi Distrik Metemani berupa daratan rendah, berbukit terjal, jurang, sungai dan laut.

Kampung pada Distrik Metemani awalnya memiliki 3 kampung difinitif kemudian berbentuk 3 kampung pemekaran. Sehingga pada saat ini ada 6 kampung. Letak kampung secara keseluruhan berada pada satu daratan yang membentang dari ujung Timur hingga ke barat, antar kampung terpisahkan oleh hutan. Hubungan antar kampung-kampung di Distrik Metemani sebagai besar dapat ditempuh dengan menggunakan jalan darat. Dan juga ikut sungai kampung Bedare merupakan kampung terjauh dari ibu kota Distrik, untuk menuju kampung tersebut harus melelui pinggiran lewat dalam sungai dan melalui jalan longing yang membelah hutan lebat dengan kondisi jalan sebagian diperkeras dan sebagian masih timbunan tanah, untuk jalan di dalam kampung secara keseluruhan masih jalan tanah dan bila hujan kendaraan double garden yang bisa melalui.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Distrik Metemani Kabupaten Sorong Seletan

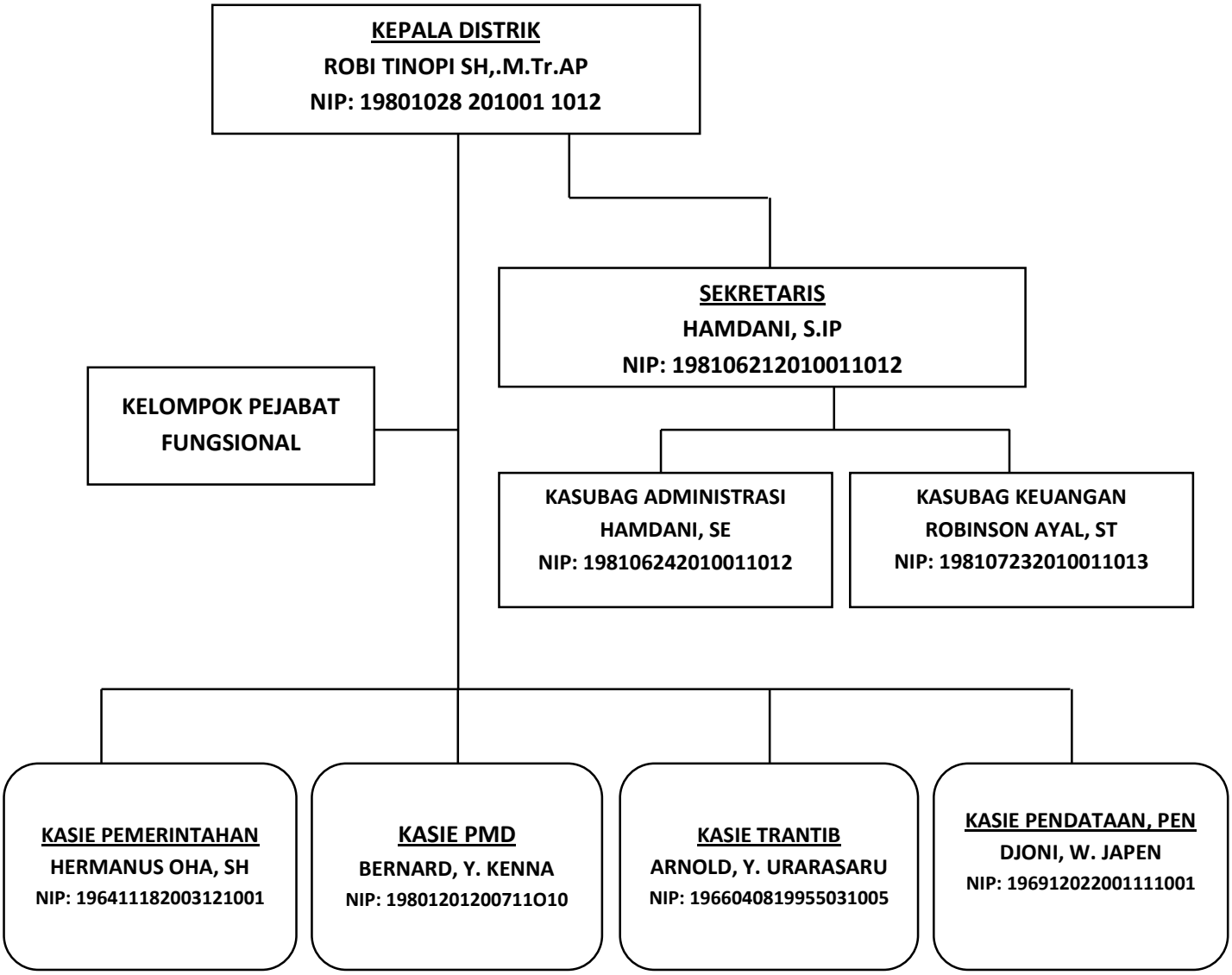

Tugas dan fungsi kepala Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan

a. Camat/Distrik

Camat/Distrik Memiliki tugas pokok membantu bupati untuk dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat/distrik oleh bupati di wilayah Kecamatan/Distrik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas. Camat/Distrik mempunyai sebagai beriku :

1. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Kerja) Kecamatan/Distrik
2. Mengkoordinir dan mengarahkan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah serta urusan umum dan kepegawaian Kecamatan/Distrik
3. Mengkoordinir dan mengarahkan peleksanaan program dan kegiatan pada secretariat serta seksi-seksi di bahwanya.
4. Melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Camat/Distrik di wilayah Kecamatan/Distrik
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta pembangunan dan pemeliharaan sarana prasaranan peleyana umum.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
7. yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan/distrik
8. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

9. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan/kampung.
10. Mengendalikan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
11. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan/distrik.
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.
13. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
14. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
15. Menyelenggarakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / kegiatan Camat/Distrik
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sekretaris Kecamatan/Distrik

Sekretaris Kecamatan/Distrik memiliki tugas pokok membantu Camat/Distrik dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan/Distrik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksuk di atas, Sekretaris Kecamtan/Distrik memiliki fungsi :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretaris.
2. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan/Distrik
3. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan Kecamatan/Distrik
4. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Kecamtan/Distrik.

5. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
6. Mengoodinasikan peleyanan teknis administratif kepada selueuh Seksi di lingkup Kecamatan/Distrik
7. Mengoordinasikan pengelolaan keuangan di lingkup Kecamatan/Distrik
8. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum, kerumah tanggaan, perlengkapan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Kecamatan/Distrik
9. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dilingkup Kecamatan/Distrik
10. Mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
11. Melaksanakan pengoordinasikan terkait proses pengadaan barang/jasa di lingkup
12. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Kecamatan/Distrik
13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat.
14. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
15. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
16. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan peleksanaan tugas/kegiatan Sekretariat.
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

A. Kepala sub Bagian Program dan Keuangan

Kepada Sub Bagian Program memiliki tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan/Distrik dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program,

evaluasi program kerja dan pelaksanaannya. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepada Sub Bagian Penyusunan Program memiliki fungsi:

1. Menyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Program.
2. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan/Distrik
3. Mengkoordinasikan perencanaan penyusunan program dan kegiatan tahunan Kecamatan/Distrik berdasarkan usulan dari Sekretariat di masing-masing Seksi
4. Mengkoordinasikan proses dan penyusunan program dan kegiatan tahunan Kecamatan/Distrik berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing-masing Seksi serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran.
5. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Seksi dalam rangka proses pencairan keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan/Distrik.
6. Melaksanakan kegiatan terkait administrasi pertanggujawaban keuangan Kecamatan/Distrik
7. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Kecamatan/Distrik
8. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja Kecamatan/Distrik
9. Mengkoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas Kecamatan/Distrik
10. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan di Kecamatan/Distrik
11. Melaksanakan monitoring dan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan keuangan.
12. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
13. Memberi saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.

14. Melaksanaan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian program dan keuangan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

d. Kepala Sub Bagain Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Umum dan Kepagawaian mempuyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan/Distrik dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, keasipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan dinas. Untuk penyelenggarakan tugas pokok segaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempuyai fungsi:

1. Menyusun rencana program dan keegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan surat menyurat dan penglolaan arsip.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan dilingkup Kecamtan/Distrik
4. Mengkoordinasikan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Kecamatan/Distrik
5. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan/Distrik
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
7. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
8. Memberi saran/pertimbangan kapada atasan sebagai bahan masuk.
9. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / kegiatan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

e. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan memiliki tugas pokok membantu Camat/Distrik dalam bidang tata pemerintahan. Untuk menyelenggarakan akan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan.
2. Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagai perumasan kebijakan teknis Seksi Tata Pemerintahan.
3. Mengkoordinasikan pelaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka mematapkan pengalaman Pacasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertaan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
6. Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keaneka ragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan kehidupan demokrasikan berdasarkan Pancasilan.
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi pemerintahan.
10. memberkani petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
12. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan Seksi Pemerintahan.
13. Melaksanakan tugas kedinasan-kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

F. kepada seksi pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.

Kepada Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas pokok membantu camat/distrik dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, kapada Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
2. Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan.
3. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan/Distrik dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan/Kampung dan Kecamatan/Distrik

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unti kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan/Distrik
5. Melakukan evaluasi terhadap barbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan/distrik baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
6. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan/Distrik
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi pembangunan masyarakat dan pembangunan.
8. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
10. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
11. Melaksanakan tugas kedinasan-kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

G. Kepada Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Kepada Seksi Ketentaraman Umum memiliki tugas pokok membantu camat/distrik. Dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum memiliki fungsi:

1. Menyusun rencana program an kegiatan Seksi Ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan/distrik

2. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketertraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
3. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelnggaraan kententraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan/Distrik
4. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berbeda di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan kentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan/distrik
5. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan
6. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah uang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kententraman ketertiban umum dan Pelindungan Masyarakat.
8. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi peleksanaan tugas bawahan
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan bahan masukan.
10. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan Seksi Kententraman, ketertiban umum dan Pelindungan Masyarakat.
11. Melaksanakan tugas kedinasan-kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

H. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi Pelayanan Umum memiliki tugas pokok membantu Camat/Distrik dalam bidang pelayanan umum. Umtuk menyelenggarakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pelayanan Umum memiliki fungsi:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pelayanan Umum di wilayah Kecamatan/Distrik

B. Visi dan Misi Distrik Metemani

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
3. Peninggakatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar
4. Peningkatan komoditas unggulan
5. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dan memberbaiki tata kelola pemerintahan

1. **Secara Geografis Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan**

Tabel 4.1 Persentase Luas Wilayah Distrik Metemani Kabupaten sorong selatan

Kampung/Kelurahan	Luas(km2)	Persetase
(1)	(2)	(3)
Distrik Metemani	18.637	98.30

Sumber Data Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan

Tabel 4. 2 Batas Wilayah Distrik Metemani

1.	Sebelah Utara	Berbatasan dengan Distrik Kais
2.	Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Distrik Kokoda
3.	Sebelah Barat	Berbatasan dengan Distrik Inanwatan
4.	Sebelah Timur	Berbatasan dengan Distrik Kais Darat

Sumber data: distrik metemani kabupaten sorong selatan

Tabel 4.3 Ibukota Kampung Dan Ketinggian Dari Permukaan Laut Menurut Di Distrik Metemani

Kampung	Pesisir	Lereng/Punggung Bukit	Daratan Das
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mugim	-	-	1
2. Nusa	-	-	1
3. Saga	-	-	1
4. Puragi	-	1	1
5.Tawanggire	-	-	1
6. Bedare	-	-	1
Jumlah	-	1	6

Sumber Data: Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan

2. **Pemerintah Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan**

Distrik berarti kecamatan/distrik adalah wilayah kerja perangkat daerah di bawah kabupaten. Distrik Metemani dipimpin oleh seorang kepala Distrik sebagai perangkat kerja daerah pada wilayah Distrik. Sedangkan Kampung dipimpin oleh kapala Kampung yang dibantu dengan beberapa perangkat Kampung dalam menjalankan roda pemerintahan. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Susunan administrasi di tingkat kampung terdiri dari kepada kampung,

sekretarias kampung, yang dibantu beberapa kaur dan ketua baperkam, Peleyanan kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan baik kepada masyarakat bila didukung dengankedisiplinan aparat Distrik. Sebagian sekretaris kampung sudah berstatus Pegawai Negeri, Distrik Metemani sebelumnya memiliki 6 kampung difinitif, yaitu kampung Mugim, Saga, Puragi, menjadi beberapa kampung pemekaran, yaitu kampung Bedare Tawanggire memiliki kampung pemekaran dari kampung Puragi dan kampung Nusa dipemekaran dari kampung Mugim semua kampung di Distrik Metemani berstatus sebagai desa atau kampung, belum ada Desa yang berstatus kelurahan

Distrik Metemani mempuyai satuan Lingkungan terkecil setingkat Rukun Tangga (RT) sebanyak 18 RT, Kampung Puragi merupakan kampung yang menpuyai RT terbanyak dengan 4 RT, Distrik Metemani mempuyai 6 Kepala Kampung, 6 Sekretaris 6 Ketua BPD Dekel.

Distrik Metemani dipimpin oleh seorang kepala Distrik sebagai perangkat kerja daerah pada wilayah Distrik. Sedangkan Kampung yang dibantu dengan beberapa perangkat Kampung dalam menjalankan roda Kepala pemerintahan, Kampung adalah kesatuan masyrakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Susunan administrasi di tingkat kampung terdiri dari kepala kampung, sekretaris kampung, yang dibantu beberapa kaur dan ketua baperkam. Peleyanan kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan baik kepada masyarakat bila didudung dengan kediliplinan aparat

Distrik. Sebagian sekretaris kampung sudah berstatus pegawai negeri.

Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Distrik Menurut Status Kepegaaian distrik metemani

	Jumlah
1. ANS	20
2. CPNS	-
3. HONORER	3

Sumber Data: Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan 2023

Tabel 4.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Distrik Metemani

Golongan Kepangkatan	Jumlah
1. Golongan I	-
2. Golongan II	3
3. Golongan III	2
3. Golongan IV	2

Sumber Data: Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan 2023

Tabel 4.6 Status Desa/Kampung Distrik Metemani

Kampung/Kelurahan	Difinitif	Persiapan
1. Mugim	1	2
2. Nusa	1	2
3. Saga	1	2
4. Puragi	1	2
5. Tawanggire	1	2
6. Bedare	1	2
Jumlah Kampung	6	12

Sumber Data: Kampung Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan 2023

Tabel 4.7 Banyaknya Satuan Lingkungan Setempat menurut kampung di Distrik

Kampung	**Rukun warga**	**Rukun Tetangga**	**Jumlah**
1. Mugim	3	16	19
2. Nusa	3	10	13
3. Saga	2	10	12
4. Puragi	2	14	16
5. Tawanggire	3	10	13
6. Bedare	2	10	12
Jumlah	15	70	95

Sumber Data: Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan 2023

4. Demografi dan Sosial Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan.

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sebali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh pendudk yang berdomisili di wilayah territorial Indonesia termasuk warga Negara asing kecuali anggota korps diplomatic Negara sehabat beserta keluarganya. Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden dan juga meluli e-census.

Pencatatan penduduk menggunakan konsep usul residence, yaitu konsep di mana penduduk biasa bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah di mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak

bertempat tinggal tetap dicacah di tempat di mana mereka ditemukan petugas sensus pada malam Hari Sensus, Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/rumah masyarakat terpencil/terasing, dan pengungsi. Bagi mereka yang mempuyai tempat tinggal tetap dan sedang bepergian ke luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya, tetapi dicacah di tetap tujuannya. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk Indonesia 2010- 2035 menggunakan data dasar penduduk hasil SP2010.

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah territorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan. Komposisi penduduk adalah pola persebaran penduduk menurut karakteristiknya,

contoh: penduduk menurut kelompok umur, penduduk menurut jenis kelamin.

Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makan dari satu dapur. Yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama menjadi satu. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal disuatu rumah tangga, baik yang barada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada Rata-rata anggota rumah tangga adalah angka yang menunjukkan rata-rata jemlah anggota rumah tangga. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

Penduduk pada Distrik Metemani berdasarkan proyeksi BPS penduduk Tahun 2021sebanyak 2.851 jiwa yang terdiri atas 1.425. jiwa penduduk laki-laki dan 1.426 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Tahun 2021, penduduk Distrik Metemani 2021-2022 mengalami laju pertumbuhan sebesar 2.35 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin Tahun 2021 rata-rata 66.48.

Apabila dilihat berdasarkan desa/kampung bisa diketahui bahwa Puragi mempuyai penduduk terbanyak berjumlah 1. 862 yang terbagi atas laki-laki sebanyak 901 jiwa dan perempuan sebanyak 961. Sedangkan kampung dengan penduduk dengan penduduk terkecil yaitu kampung Saga sebasar 986 jiwa yang terbagai atas penduduk laki-laki sebanyak 442 jiw dan perempuan 544 jiwa. Kepadatan penduduk di Distrik Metemani tahun 2021 mencapai 5.800 jiwa lebih/km2.

Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Menurut Umur Berdasarkan Jenis Kelemin Distrik Metemani 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	85	77	162
5-14	173	124	277
15-19	178	221	399
20-25	322	229	556
25-35	488	313	801
35-90	323	329	652

Sumber Data: Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan 2023

Tabel 4.9 Proyeksi kepadatan rumah tangga menurut kampung

Kampung	Rumah Tangga	Penduduk	Kepadatan Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mugim	390	565	380
2. Nusa	349	593	406
3. Saga	351	567	410
4. Puragi	368	635	436
5. Tawanggire	362	628	428
6. Bedare	355	598	398

Sumber Data: Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan 2023

3. Sosial Budaya Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan.

Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak pernah terdaftar atau belum pernah aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal.

Termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melenjutkan ke sekolah dasar. Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan formal dan nonformal (Paket A, B, atau C). baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.

Tidak bersekolah lagi adalah mereka yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal dan nonformal (Paket A, B, atau C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif mengikuti pendidikan. Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swast dengan mendapatkan tanda tamat belejar/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelejaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian akhir dan lulus dianggap tamat sekolah

Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, frofesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidayah (M) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertam (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah atas (SMA), Madrasah Allyah (Ma), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Allyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, spesialis, dan doktor yang

diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Rumah Sakit adalah tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan, biasanya berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, yang melayani penderita yang sakit untukberobat rawat jalan atau rawat inap. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan Kampung/Kelurahan yang mempunyai fungsi utama sebagai penyelenggara peleyanan kesehatan tingkat pertama Wilayah kerja puskesmas maksimal adalah satu kecamatan/distrik dan untuk dapat menjangkau wilayah kerjanya, puskesmas mempunyai jaringan peleyanan yang meliputi unit Puskesmas Pembantu (Pustu), unit Puskesmas Keliling (Puskel), dan unit bidang desa/komunitas (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat).

Imunisasi adalah memasukan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh dengan cara disunntik atau diminum (diteteskan dalam mulut) dengan maksud agar terjadi kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. BCG *Bacillus Calmette Guerin* merupakan vaksinasi untuk mencegah penyakit TBC, diberikan pada bayi baru lahir atau anak, dengan suntikan pada kilit pangkal lengan atas. Bekas suntikan kemudian akan membentuk tonjolan kecil jaringan parut pada kulit lengan atas. Suntikan BCG diberikan kepada anak sebanyak 1 kali.

DPT *Difteri, Pertanus, Tetanus* merupakan vaksin untuk mencegah penyakit Difteri, Pertusis, dan Tetanus yang diberikan pada bayi berumu 3 bulan ke atas, dengan suntikan pada paha, diulang 1 bulan dan 2 bulan kemudian, sehingga suntikan imunisasi DPT lengkap pada balita berjumlah 3 kali (kadang-kadang

selang waktu antar suntikan bisa lebih dari 1 bulan).

Pembangunan Desa/Kampung adalah upaya peningkatan kualitas kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Desa/Kampung. Metode yang digunakan untuk mrngukur tingkat pembangunan desa/kampung adalah indeks Desa/Kampung Membagun (IDM) yang disusun oleh Kementerian Desa/Kampung. Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Indeks desa/kampung Membangun (IDM) ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa/Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2006. Tujuan IDM adalah menetapkan status kemajuan dan kemandirian suatu desa/kampung dan menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan. Desa/Kampung Secara umum IDM dapat dikatakan sebagai indeks komposit yang tersusun atas tiga indeks lainnya yaitu:

a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS).
b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
c. Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL)

Keadaan sosial yang ada di Distrik Metemani yaitu pendidikan, Kesehatan dan Keagamaan. Pada tahun 2017 sarana pendidikan di Distrik Metemani terdiri dari 6 PAUD, 6 Taman Kanak-kanak, 6 Sekolah Dasar 2 Sekolah Menengah 1 SMA, salah satu penunjang keberhasilan pendidikan adalah tersedianya tenaga pengajar yang memadai untuk setiap jenjang pendidikan. Rasio murid-guru merupakan salah satu indikator yang menggambarkan beban kerja seorang guru terhadap muridnya.

Rasio ini juga mencerminkan mutu pendidikan dikelas, karena semakin besar

angka ini berarti beban kerja seorang guru semakin berat pula, dan pengawasan atau kontrol yang dilakukan akan berkurang. Fasilitas Kesehatan yang tersedia di Distrik Metemani hanya 1 buah Puskesmas. Puskesmas Terletak Di kampung Mugim dan Nua ibukota Distrik Puskesmas Pembantu 6 buah Pustu yang terlatak di Kampung Saga Puragi Tawanggire dan Bedare.

Tabel 4.10 Banyaknya sekolah menurut jenis sekolah

No	Tahun (1)	PAUD (2)	TK (3)	SD (4)	SMP (5)	SMU/SMK (6)
1	2023	6	-	6	2	1
2	2022	6	-	6	2	-
3	2021	4	-	6	2	-
4	2020	4	-	6	2	-
5	2019	4	-	6	1	-

Sumber Data: Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan 2023

Tabel 4.11 Banyaknya rumah sakit puskesmas puskesmas

No	Kampung/Kelurahan	Rumah Sakit/Puskesmas	Balai Pengobatan
1	Mugim	1	1
2	Nusa	1	1
3	Saga	1	1
4	Puragi	1	1
5	Tawanggire	1	1
6	Bedare	1	1

Sumber Data: Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan 2023

Tabal 4.12 Jumlah tenaga medis kesehatan

Tahun	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi
2020	1	12	7	7
2021	1	12	7	7
2022	1	13	10	7
2023	1	14	19	7

Sumber Data: Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan 2023

Tabel 4.13 Banyaknya tempat ibadah

No	Tempat Ibadah	Agama	Jumlah
1	Masjid	Islam	2
2	Gereja	Katolik	-
3	Gereja	Kristen Protestan	6
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Konghucu	-	-

Sumber Data: Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan 2023

Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/ menyelurkan air, yang baisanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh atau status lahan tersebut. lahan yang dimaksud termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi Bangunan, luran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan Rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi, palawija atau tanaman semusim lainnya.

Tegal/Kebun adalah lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah pindah. Lading/huma adalah lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang biasanya ditanami tanaman semusim dan penggunaannya hanya semusim atau dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi (berpindah-pindah), Kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah subur, lahan yang sementara tidak diusahakan adalah lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara (lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun) tidak diusahakan, termasuk lahan sawah yang tidak diusahakan selama lebih dari 2 (dua) tahun) , Data pokok tanaman pengan yang dikumpilkan adalah luas panen dan produktivitas (hasil per hektar). Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara laus panen denganpruduktivitas Pengumpulan data luas panen dilakukan setiap bulan dengan pendekatan area distrik di seluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan data produktivitas dilakukan melalui pengukuran langsung pada plot ubina berukuran $2^1/_2$ m x $2^1/_2$ m, Pengumpulan data produktivitas dilakukan setiap subround (empat bulanan) pada waktu panen petani.

Data produksi padi dan palawija yang disajikan adalah dalam kualitas gabah kering giling (padi), pipilan kering (jagung), biji kering (kedelai dan kacang tanah), dan umbi basah (ubi kayu dan ubi jalar. Tanaman sayuran semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah dan umbinya, yang berumur kurang dari satu tahun. Tanaman buah-buahan semusim adalah tanaman sumber vitamin garam mineral,

dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa bauh, berumur kurang dari satu tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tatapi menjalar dan berbatang lunak.

Pertanian dan bidang Nelayan masih merupakan sektor andalan ekonomi untuk meningkatkan tarf kehidupan masyarakat di Distrik Metemani Sebagian besar penduduk di Distrik Metemani bekerja di sektor Pertanian Nelayan dan Swasta secara umum Distrik Metemani memiliki keunggulan dalam bidang pertanian dan nelayan, khususnya bidang pertanian tanaman padi sawah buah-buahan. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pengan, bahan baku industry, atau sember energy, serta untuk mengelola lingkungan. Dari sawah tersebut menghasilan padi, hasil pertanian ini menyuplai sebagian besar beras lokal untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan. Selain mengusahakan tanaman padi sawah, petani mengusahakan tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran . pertanian disini belum dikelola dengan baik, hal ini yang dapat dilihat dari produksi sektor pertanian belum maksimal. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah.kegiatan pertanian dapat mencakup budidaya tanaman, bercocok tanam, pembesaran hewan ternak, eksploitasi hutan, dan penangkapan ikan. Produksi tanaman palawija merupakan salahsatu hasil pertanian di Distrik Metemani. Selain itu ubijalar dan ubi kayu merupakan komonitas pertanian yang dihasilkan masyarakat Distrik Metemani.

BAB V

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Kepala Distrik dalam Pengelolaan Dana Kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memilik peran yang sangat besar dalam pemenuhan jaza pelayanan publik, baik dari segi pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dll, namun pada kenyataannya tidak semua upaya pemerintah dalam pemenuhan peningkatan pelayanan berjalan baik, salah satunya adalah akses pelayanan publik yang belum maksimal di terutama di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan karna masih ada 3 kampung yang jauh dari ibu kota Distrik.

Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat besar dalam kesajahteraan masyrakat. Peran role merupakan aspekdinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sessuai dengan kedudukannya Pelayanan publik pada dasar menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utlilitas, dan lainnya.

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luat dan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong perubahan kualitas Pemerintahan Daerah Bagaimanapun kecilnya suatu Negara, Negara tersebut tetap

akan membagi-bagi pemerintahan menjadi sistem yang lebih kecil Pemerintahan Daerah untuk memudahkan pelimpahan tugas dan wewenang. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat, istimewa. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintahan memiliki fungsi memberikan berbagai pelayana publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan kesehatan, utlilitas dan lainnya.

Dalam wawacara dengan kepala Distrik bapak ROBI TINOPI, SH.,M.Tr.AP tentang Peran kepala distrik dalam pengelolaan dana kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan beliau menyatakan sebagai berikut:

> Menurut saya peran pemerintah distrik metemani dalam meningkatkan pengelolaan dan pengawasan dana kampung hal itu sangat penting karena selama ini dana kampung yang dikelola oleh kepala kampung sampai saat ini tidak ada dampak pembangunan di kampung-kampung yang ada di distrik metemani karena kepala kampung yang menjabat menjadi kepala kampung tidak mampu mengola dana yang diberikan oleh pemerintah untuk mensejahtarakan masyarakat yang ada di kampung-kampung karena kepala kampung yang menjabat memiliki pemikiran yang terbatas karena istandar pendidikannya terbatas karena kepala kampung saat ini yang menjabat memiliki ijazah, SMP SMA saja maka dana kampung yang di berikan oleh pemerintah selama ini tidak berdampak bagi masyarakat yang di distrik metemani dana kampung di khususkan bagi pembangunan yang layak bagi masyarakat yang dan di distrik metemani.

Menyikapi perubahan yang timbul di masyarakat dan perubahan paradigm peran dan fungsi pemerintahan tersebut diatas. Kebutuhan akan modernisasi

kebijakan menajemen pelenyanan dan pengelolaan menjadi suatu yang tidak bisa dielakkan lagi. Pengalaman Negara lain dalam melaksanakan pembaharuan membuntuhkan waktu yang tidak sebentar dan terfokus pada suatu tujuan dan sasaran yang jelas. Pembaharuan pelayanan dan pengelolaan dana kampung ditujukan untuk mengurangi alokasi sumber daya nasional yang dikonsumsi atau digunakan untuk biaya internal sektor publik, memperbaiki kualitas peleyanan publik, mengembalikan pertumbuhan perekonomian akibat krisis pada saat itu, dan untuk mningkatkan performance Pegawai Negeri.

Debirokratisasi menjadi semakin relvan jika dilakukan bersamaan dengan peningkatan muti SDM mengingat setiap jenis, skala dan lingkup kebijakan publik berimplikasi sangat serius terhadap dinamikan perubahan kelembagaan baik secara normatitif, structural maupun kultural yang berkembang di masyarakat. Masyarakat merasa jika berhubungan dengan layanan birokrasi sering tidak efisien dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi high cost economy. Untuk menghilangkan penyakit tersebut makan debirokratisasi menjadi mendesak untuk dilakukan dengan alasan:

1. Sebagai agen pembangunan, birokrasi dituntut menjawab tuntutan publik dan menjadikan tuntutan itu sebagai dasar pembuatan kebijakan
2. Kebijakan yang dibuatnya itu mesti melahirkan efisensi sebagai *outcomesnya*.
3. Jasa layanan publik yang disajikan mesti mendorong efisinsi dan pertumbuhan sebagai cerminan bahwa mutu layanan yang diberikan semakin baik.
4. Birokrasi dituntu untuk mampu mendorong dunia usaha agar berperan aktif dalam menggerahkan pertumbuhan ekonomi nasional.

5. Birokrasi harus menyadari perannya sebagai *egent of development* berarti menggerakkan menumbuhkan stabilitas dalam konteks perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam wawancara dengan sekretaris Distrik bapak HAMDANI, S,IP tentang Peran kepala Distrik dalam Pengelolaan Dana Kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan beliau menyatakan sebagai berikut:

> Menurut saya peran dan hambatan yang kami pemerintah alami tahu saya selaku sekretaris distrik rasahkan peran kepala distrik dan hambatan yang selama ini kepala kampung tidak perna melaporan hasil dari pengelolaan dana kampung yang di kelola oleh kepala kampung selama ini keyatahannya yang kami pemerintah alami karna tidak ada surat yang dari kami pemerintah distrik buat contahnya surat rokomendasi dari distrik agar dana yang diberikan oleh pemerintah pusat bisa cairkan karna ada surat yamg kami buat juga kami bisa mengawasi dana kampung yang dikelola oleh kepala kampung tersebut.

Pendekatan penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat peleyanan, artinya kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama dalam keseluruhan proses penyelenggaraan peleyanan publik. Pemberian peleyanan publik secara cepat dan tepat dalam era informasi dan globalisasi yang sedemikian pesat dan cepat mutlak untuk dilaksanakan. Sebab kalau tidak akan melahirkan suatu gejolak sosial, bahkan disintegrasi bangsa yang pada akhirnya akan melahirkan perpecahan dan kehancuran bangsa.

Fungsi utama pemerintah daerah yang merupakan penyelenggara peleyanan publik, dan seiring dengan tuntutan perkembangan, maka menjadi keharusan pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam peleyanan publik tersebut. Akan tetapi fenomena saat ini, kepercayaan masyarakat/publik terhadap kinerja

pemerintah atau pelaku birokrasi peleyanan masih mengelami pergeseran oleh akibat dari masih terdapatnya kinerja aparatu pemerintah / birokrasi yang masih rendah. Pelayanan publik merupakan peleyanan desar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peleyanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerjan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Penyelenggaraan pemerintahaan dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Peleyanan yang baik berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja peleyanan yang diberikan.

Dalam wawancara dengan pegawai Distrik bapak HERMANUS OHA., SH tentang Peran kepala Distrik dalam Pengelolaan Dana Kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan beliau menyatakan sebagai berikut;

> Menurut saya Peran kepala Distrik dan Pemerintah Distrik dalam Pengelolaan dan pengawasan Dana Kampung adalah Upaya yang bagus dan baik agar meningkatkan pengelolaan dan pengawasan dana kampung, dan yang sangat penting dalam penyelenggaraan dana kampung yang dilaksanakan oleh kepala-kepala kampung dalam berbagai sektor pelayanan dan pengelolaan terutama yang menyagkut pembangunan kepada masyarakat yang ada di kampung lebih kususnya di distrik metemani.

Tuntutan akan pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan kompleks, serta sulit dipenuhi secara individu, dan keterbatasan sumber daya manusia, mewarnai perkembangan kehidupan manusia dewasa. Hal ini mendorong manusia melakukan kerjasama, baiksecara individu, maupun secara kelompok organisasi. Itu sebabnya dikatakan bahwa dunia modern adalah dunianya kerjasama, sebab tanpa kerjasama, tiap individu, organisasi, bahkan Negara dan

pemerintahan, tidak akan dapat survive. Meskipun aktivitas kerjasama sudah ada sejak adanya peradaban manusia, namun pada zaman sekarang ini bentuk kersama tersebut semakin menujukkan kompleksivitas dan menyangkut hamper semua aspek kehidupan dan memerlukan sistem peng-administrasian yang kompleks pula.

Manajemen dari setiap kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Demikian pula dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, tentu saja diperlukan suatu sistem administrasi yang sangat kompleks yang sering disebut, dengan administrasi Negara. Sejalan dengan perkembangan Dimensi menajemen menyengkut. Proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat diimplementasikan digerakkan, diorganisir dan dikontrol untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip manajemen. Ini dapat dianalogikan dengan sistem jantung dan urat nadi yang menyeluarkan darah keselurah tubuh termasuk ke organ-organnya agar dapat bergerak dan berfungsi.

Dalam wawancara dengan masyarakat bapak Silwanus korie tentang Peren Kepala Distrik Dalam Pengelolaan Dana Kampung Di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan beliau menyetakan sebagai berikut;

> Menurut saya sebagai masyarakat yang merasakan Peran dari kepala Distrik Metemani itu sangat penting untuk mengawasi dan pengelolaan dana kampung itu baru kebutuhan kami masyarakat selalu di penuhi sesuai dengan peraturan yang ada dan juga Peran Pemerintah Distrik itu sangat baik agar dana kampung bisa bermafaat bagi kami masyarakat di Distrik Metemani.

Lebih lanjut wawancara dengan masyarakat bapak Yoel Derione tentang Peran kepala Distrik dalam pengelolaan dana kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan beliau menyetakan sebagai berikut:

Menurut saya masyarakat harus ada peran dari pemerintah distrik agar dana

> kampung yang di perikan oleh pemerintah pusat bisa berdampak positif/baik karna selama ini dana kampung yang di kelola oleh kepala kampung tidak perna transparan dengan kami masyarakat karena tidak ada pengawasan dari pemerintah dalam hal pemerintah distrik.

Standar proses pengelolaan dana kampung itu juga sangat penting untuk diatur, namun pengaturannya harus dilakukan secara hati-hati agar standar proses pengelolaan dan pengawasan dana kampung bisa berguna kepada masyarakat distrik metemani dan pelayanan tidak mencegah atau membatasi kriativitas lokal dalam menyelenggarakan dana kampung kepada masyarakat namun saat ini proses penyelenggaraan layanan harus memenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Standar proses perlu di rumuskan untuk menjamin peleyanan publik kepada masyarakat di distrik metemani maupun daerah memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan layanan yang transpara, non-partisan, efisien, dan akuntabel. Standar transparansi, mengatur kewajiban penyelenggara layanan untuk meyediakan informasi dan menjelaskan kepada warga pengguna layanan dana kampung untuk mengenai persyaratan, prosedur, biaya, dana waktu yang diperlikan untuk mendapatkan pelayanan dana kampung, termasuk yang harus ada dalam standar transparansi adalah keharusan bagi peyelenggara untuk memberitahukan ha-hak warga pengguna untuk mengadu dan memprotes ketika meraka merasa diperlukan secara tidak wajar oleh penyelenggara layanan. Standar juga harus mengatur secara proposional hak dan kewajiban antara penyelenggaraa dan penggunaan dana kampung.

Dalam wawancara dengan masyarakat bapak Joni Goware tentang peran kepala Distrik dalam Pengelolaan Dana Kampung di Distrik Metemani Kabupaten

Sorong Selatan beliau menyetakan sebagai berikut:

> Menurut saya Peran kepala distrik itu sangat penting agar dana kampung yang di berikan oleh pemerintah pusat, untuk masyarakat yang miskin/tidak mampu. Dan Dana kampung yang dikelola oleh kepala kampung bisa berguna dan bermanfaat bagi kami masyarakat yang ada di distrik metemani. karna selama ini dana kampung yang di cairkan dan di kelola oleh kepala kampung tidak ada dampak pembangunan bagi kami masyarakat yang ada kampung Tawanggire.

Pemberian layanan umum kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi aparatur nagara sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, sehingga penyelenggaraannya perlu ditingkatkan secara terus-menerus sesuai dengan sasaran pembangunan. Selain itu dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis diatas, birokrasi publik dituntut harus dapat posisi dan paran *revitalisasi* dalam memberikan pelayanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah manjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan, barubah menjadi suka menolong menuju kea rah yang fleksibel kolabiratis dan dialogis dan dari cara-cara slogani.

Pemberian dana kampung kepada masyarakat oleh pemerintah pusat dan daerah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat Negara sebagai peleyanan pada masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintahan dalam peleyanan umum sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan peran pengawasan dana pengelolaan dana kampung yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana pemerintah telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. Dengan demikian akan dilakukan penilaian tentang sama tidaknya antara harapan dan kenyataan di dalam pengurusan

sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan publik kepada masyarakat setempat. Apabila menuju cara-cara kerja yang realistic dan pragmatis.

Dalam wawancara dengan masyarakat bapak Kalvin Derione tentang Peran Kepala Distrik Dalam Pengelolaan Dana Kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan beliau menyatakan sebagai berikut:

> Menurut saya bahwa dana kampung yang di berikan oleh pemerintah pusat untuk kami masyarakat miskin namun salama ini dana kampung yang dikelola oleh kepala kampung tidak ada pembangunan dan pos-pos lainnya. Karena kurang ada peran dari pemerintah distrik oleh sebab itu harus ada pengawasan dari pemerintah distrik agar dana kampung yang di berikan kepada kami masyarakat bisa berdampak positif/baik dan dana kampung bisa bermanfaat bagi kami masyarakat yang ada di distrik metemani.

Pemerintah diharapakan mampu mengoreksi keadaan agar lebih teliti dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya dipertanyakan apakah terhadap kehendak masyarakat, seperti ketentuan biaya yang tepat, waktu yang diperhutungkan dan mutu yang dituntut masyarakat telah dapat terpenuhi. Adaikata tidak terpenuhi, pemerintah diharapkan mengoreksi keadaan, sedangkan apabila terpenuhi dilanjutkan pada pertanyaan berikutnya, tentang informasi yang diterima masyarakat berkenaan dengan situasi dan kondisi, serta aturan yang melengkapinya.

Peran kepala distrik sangat penting untuk pengelolaan dana kampung bahwa hal itulah yang perlu di siapkan kepala distrik dan aparat pemerintah distrik untuk bagaimana tercipta pangawasan dan pengelolaan dana kampung prima hal itu merupakan suatuusaha untuk membantu menyiapkan apa yang diperlukan atau dibutuhkan oleh orang lain, sedangkan prima merupakan kata yang berarti terbaik, bermutu dan bermanfaat. Jadi kalau kedua kata tersebut dirangkai maka dapat

mengandung arti yang merupakan pengawasan dan pengelolaan terbaik yang diberikan sesuai dengan standar mutu yang mana dapat memuaskan dan sesuai dengan apa yang diharapkan atau melebihi dengan apa yang di harapkan oleh konsumen dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna jasa layanan

B. Hambatan Peran Kepala Distrik Dalam Pengelolaan Dana Kampung Distrik di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan

1. Fasilitasi Penyusunan Perkam dan Perkakam
2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa/kampung
3. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa/kampung dan pendayangunaan asset desa/kampung
4. Fasilitas Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
5. Fasilitasi pelaksanaan tugas kades/kampung dan perangkat desa/kampung
6. Fasilitasi pelaksanaan perkam
7. Fasilitasi pelaksanaan tugas BPD Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa/kampung
8. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pemb. Daerah dengan pembangunan desa
9. Fasilitasi penetapan lokasi PKP
10. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
11. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
12. Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan pertisipatif
13. Fasilitasi kerjasama antar-desa/kampung dan KSD dengan pihak kegiatan
14. Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang dsa/kampung serta penetapan dan penagasan batas desa/kampun

15. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan Pemberdayahan, masyarakat. Koordinasi pendampingan desa/kampung di wilayahnya koordinasi pelaksanaan PKP di wilayah.Metemani Kabupaten Sorong Selatan.

Pelayanan publik, perkembangan sosial kemasyarakatan dalam tatanan pemerintahan semakin tinggi dari tahun ke tahun. Aspek perimintaan masyarakat dalam peran kepala distilk dalam pengelolaan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan dan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Semakin tinggi permintaan pelayanan masyarakat kepada pemerintah dalam memenuhi kebutuhannya, tentunya berpengaruh terhadap kinerja pemerintah distrik untuk. Mengingat pelayanan publik kepada masyarakat yang ada saat ini masih banyak menggunakan sistem konvernsional yang mengandalkan kemampuan dan skil dari unsur manusianya. Sementara itu, keterbatasan SDM aparatur pelayanan menjadi pengaruh tersendiri dalam dan hambatan yang mungkin dirasakan oleh pemimpin pemerintah distrik/instansi pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan bagi SDM aparatur palayanannya.

Perubahan dan tumpang tindinya peraturan bagi SDM aparatur pelayanan publik. SDM aparatur peleyanan publik merupakan pengabdian kepada pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN sebagai pelayanan masyarakat diukur dan dipekerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, Undang-Undang peraturan kepala daerah dan aturan-aturan lain yang mengikat secara legal. Pengembangan SDM aparatur masuk kedalam aspek peraturan per Undang-Undangan yang mengatur tenteng bagaimana meningkatkan kualitas SDM dalam organisasi

pemerintah. Namun dalam perkembangannya, kadangkala muncul peraturan baru atau ketentuan baru yang mengatur dengan tingkat relevansi yang lemah.

Dalam wawancara dengan kepala Distrik Metemani bapak ROBI TINOPI, SH,.Tr.AP tentang hambatan pemerintah distrik dalam Peran dan pengelolaan dana kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan beliau menyatakan sebagai berikut:

> Hambatan yang saya sebagai kepala Distrik Metemani dan juga pemerintah Distrik halami distik metemani selama ini saya sudah berusaha untuk pengelolaan pengawasan dana kampung, namun dana kampung yang dicairkan oleh kepala kampung, dan ada banyak hambatan yang saya hadapi di masyarakat, di wilayah Distrik, dan juga hambatan saya karena kurang adanya suatu surat rokomendasi yang kami pemerintah distrik buat untuk dapat tujuankan kepada dinas terkait untuk dapat mencairkan dana kampung, kami di Distrik memiliki hambatan terutam sarana dan prasarana seperti mobil oprasional, dan transfrotasi laut, media maupun tidak ada jaringan yang bagus untuk berkomunikasi karna masih ada beberapa Kampung yang jauh karna jangkauan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik/pengawasan dana kampung, kepada masyarakat namun kami masih tidak ada transprotasi darat/laut tetapi kami tetap berusaha memberikan palayanan yang baik dan pengelolaan pengawasan yang terbaik untuk mensejahterakan masyarakat kami walaupun masih ada banyak hambatan dan kekurangan dalam pelayanan kami,

Peran pemerintah merupakan informasi sukses dalam pengelolaan dana kampung yang di berikan oleh pemeritah pusat kepada masyarakat pengelolaan dana kampung dalam sistem pemerintah. Teknologis informasi dan komunikasi mengeubah sistem pemerintahan, dari yang kaku dan tertutup menjadi pemerintahan yang demokratis informasi sangat menetukan dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam masa damai maupun masa perang. Lebih dari dua dasawarsa terakhir, teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang sangat pesat, dan menyebar ke seluruh Negara di dunia. Hubungan antara

pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha telah berubah secara fundamental melalui suatu jeringan elektronik. Oleh karena itu, sistem pemerintahan dewasa ini sudah menjadi pemerintahan elektronik *e-govemment*.

Pemerintahan elektronik, hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih dekat dan lebih terbuka. Oleh karenannya, pelayanan pemerintah kepada masyarakat telah mengalami perubahan yang sangat fundamental. Karakteristik pemerintahan elektronik juga dapat di lihat dari kemampuan pemerintah yang meningkat, terutama dalam pengalolaan dana kampung maupun dalam menghemat penggunaan sumber daya dan sektor-sektor pemerintah menjadi lebih efisien dan meningkat kinerjanya sehingga menghemat anggara Negara. *E-govemment* mampu mempercepat demokratisasi dimana masyarakat bisa aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, penetapan kebijakan publik, dan berbagai aktivitas politik. Dengan kata lain, teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi alat trensformasi dan domokratisasi dalam pengelolaan dana kampung maupun kehudupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat..

Dalam wawancara dengan masyarakat kampung Tawanggire bapak Agustinus Manas tentang hambatan pemerintah dalam Pengelolaan Dana Kampung Di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan baliau menyatakan sebagai berikut:

> Hambatan yang saya sebagai masyarakat kampung tawanggire melihat dana kampung yang di kelola oleh kepala kampung tidak berdampak di masyarakat karna tidak adanya Perannya pemerintah Distrik dalam hal ini kepala Distrik untuk pengawasi dan turut serata mengelolaan dana yang dikelolaan oleh kepala kampung agar dana bisa berguna dan berdampak pembangunan yang layak bagi masyarakat kampung tawanggire.

Sampai saat ini Distrik Metemani pada umumnya kami masih memiliki hambatan dalam meningkatkan pengelolaan dana kampung yang di berikan oleh pemerintah pusat dan daerah oleh kami masyarakat Distrik Metemani sepertinya kurangnya SDM dalam pengelolaan dana kampung belum di gunakan dengan baik dan mampu memanfaat kemajuan pembangunan fisik maupun teknologi secara optimal untuk kepenting pelayanan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai fakto, antara lain: cara berpikir kepala kampung belum maksimal/berubah dan belum memilik kesadaran bahwa pengelolaan dana kampung sangat penting bagi masyarakat cepat dan akurat sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat: kualitas SDM aparatur distrik dan kampung belum yang menguasai teknologi informasi masih sangat terbatas: banyak kurang penggunaan anggaran Negara yang lebih berorientasi pada proyek pengadaan peralatan, aplikasi teknologi informasi pada umumnya masyarakat distrik metemani masih terbatas pada penggunaan untuk pekerjaan administrasi kantor *office work* pemanfaatan *e-govermment* masih terbatas dan pada umumnya baru pada tahapan penyediaan portal atau *websit*e yang sangat terbatas dan bahkan tidak *up-to-date.*

Sistem menajemen kepala-kepala kampung belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen moderm seiring dengan pembahan paradigm global. Sistem rekrutmen, pembinaan kepada kepala-kepala kampung agar karir dan suksesi, pendidikan dan pelatihan, dan sistem remunerasi belum terintegrasi penuh dengan sistem pengelolaan dan pelayanan publik sehingga kepala kampung belum banyak hal yang tahu dan mampu bersaing dengan manajemen swasta yang sangat mengedepankan efisiensi, kreasi dan inovasi, serta daya bersaing tinggi

Dalam wawancara dengan masyarakat bapak Yohanes Daimar tentang hambatan pemerintah distrik dalam upaya meningkatkan pengelolaan dana kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan beliau menyatakan sebagai berikut:

> "Hambatan yang kami masyarakat merasakan dalam kampung tawanggire tidak ada kususnya dana kampung yang dikelola oleh kepala kampung tidak ada pembangunan kerena tidak ada yang pengawasi dana kampung yang dikelola oleh kepala kampung dan kami masyarakat minta agar pemerintah distrik harus turut serta biar dana kampung berdampak bagi kami masyarakat kampung. yang ada di distrik metemani.

Untuk meningkatkan dana kampung dan pelayanan publik menuju pelayanan yang modem, efektif, dan efisien, diperlukan komitmen kuat dan didukung oleh anggaran, sumber daya manusia, serta kerjasama dengan melibatkan lembaga-lembaga profesional dan

masyarakat untuk menetapkan langkah strategis yang meliputi, upaya yang sungguh-sungguh untuk mengetahui apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat, dan mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan dan menyediakan berbagai kemampuan pemerintah dalam rangka memenuhi harapan masyarakat tersebut.

Peningkatan kualitas pelayanan dana kampung tidak bisa ditunda-tunda, harus ditinggalkan mengingat berbagai permasalahan yang menghambat proses pembangunan infrastruktur sudah semakin sulit diatasi dengan cara-cara konvensional. Untuk itu, reformasi komprehensif yang mencakup segala aspek harus dilakukan. Sebagai prioritas utama adalah dengan melaksanakan reformasi birokrasi sebagai inti dari reformasi secara keseluruhan. Modernisasi pelayanan

publik dalam rangka reformasi birokrasi tidak hanya mencakup penggunaan peralatan modem, akan tetapi yang lebih penting adalah modernisasi cara berfikir, membangun sistem, dan mengembangkan inovasi dalam memanfaatkan sumber daya sehingga pengelolaan dana kampung menjadi semakin efektif dan efisien.

Dalam wawancara dengan masyarakat bapak Yosep Mengge tentang hambatan pemerintah distrik dalam upaya meningkatkan pengelolaan dana kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan beliau menyatakan sebagai berikut:

> "Menurut saya hambatan yang kami halami dalam pelayanan dan pengelolaan dana kampung di Distrik Metemani. Pemerintah distrik sebagai wilayah kerja ada surat teguran kepada kepala kampung. biar dana kampung yang di kelola oleh kepala kampung bisa kami masyarakat bisa rasakan dana kampung yang di berikan oleh pemerintah pusat buat kami masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat miskin dan sampai saat ini kami masyarakat masih tinggal di rumah yang tidak layak/tidak baik.

Dalam wawancara dengan kepala Kampung Tawanggire tentang hambatan yang dilakukan oleh pemerintah distrik dalam peningkatan pengelolaan dana kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan beliau menyatakan sebagai berikut:

> "Dana Kampung yang di berikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk dapat membangun pembagunan infrastruktur di kampung saya namun yang saya menjabatan kepala kampung pada tahun 2019 pada tahun itu tidak dapat mencaikan dana kampung khususnya buat pembamgunan, dana yang saya cairkan itu adalah dana Covid-19 sampai sekarang ini nanti di bulan juni baru adanya dana khususnya buat pembangunan infrastruktur di kampung saya dana Covid-19 cuman 20% khususnya cairkan baut duda jandah dan yatim piatu saja dana 80% khususnya buat pembangunan masyarakat".

Peran kepala distrik dalam pengelolaan dana kampung saat ini menjadi bagian kebutuhan masyarakat. Setiap birokrasi publik perlu berupaya untuk memberikan

kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna layanan. Pelayanan publik pemerintah dalam hal ini kantor Distrik Metemani, saat ini dirasakan semakin perlu untuk dibenahi dan ditingkatkan, terlebih dalam era seperti ini. Upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana kampung yang lebih baik merupakan suatu keharusan yang harus segera dilakukan untuk menciptakan pelayanan lebih efisien, efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kualitas pelayanan publik bidang administrasi.

Empati merupakan rasa peduli untuk memberikan perhatian kepada masyarakat terhadap kebutuhan yang sedang membutuhkan pelayanan. Sebagai instansi publik yang memberikan pelayanan dituntut untuk selalu siap dalam

membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Kepedulian pegawai untuk selalu mengutamakan kebutuhan

masyarakat akan mendukung terciptanya kualitas pengelolaan dana kampung. Terkait dengan sikap empati atau kepedulian yang ditunjukan oleh petugas pelayanan, menurut seorang informan yaitu: menerangkan dengan sejelas-jelasnya agar pelayanan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan menerima kritis mapun saran dengan sepenuh hati sebagai interopeksi untuk layanan yang lebih baik.

C. **Upaya Yang Di Lakukan Oleh Pemerintah Distrik Metemani**

Pengelolaan dana kampung merupakan suatu tanggung jawab pemerintah beserta aparaturnya kepada stakeholder dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dan seperti yang kita ketahui bahwa salah satu esensi dari pemerintahan yang baik adalah

terciptanya suatu produk layanan yang efektif, efisien dan akuntabel dari pemerintah yang diarahkan untuk masyarakat. menciptakan suatu pelayanan yang berkualitas dan melahirkan kepuasan stakeholeder yang menerimannya bukanlah suatu hal yang mudah. Tidak sedikit kendala dan faktor-faktor lain yang mengakibatkan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dirasakan masih kurang dan cenderung tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. Masih banyak kita temui keluhan-keluhan dari stakeholder dan media massa yang menilai bahwa kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah belumlah maksimal.

Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah salah satu cara dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada stakeholder. Sebab dewasa ini, keluhan-keluhan dari para stakeholder yang menilai pelayanan publik yang diberikan kepada mereka terkendala akibat masih belum tingginya sikap atau perilaku sumber daya aparatur yang langsung berhadapan dengan stakeholder. Oleh karena itu diperlukan adanya aparatur yang profesional dengan sikap atau budaya melayani dengan setulus hati sehinga diharapkan tidak ada lagi keluhan-keluhan dari publik atas pelayanan yang diberikan. Upaya peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesional pegawai terkait masalah attitude atau perilaku. Yaitu, diperlukan sikap mental yang baik dari setiap aparatur pemerintah yang langsung berhadapan dengan stakeholder dalam pemberian layanan. Sikap baik ini tentunya bukanlah seperti yang terjadi selama ini, dimana stakeholder dibuat susah dengan adanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai yang melayani. Hal ini perlu

diperhatikan, sebab seprofesional apapun aparatur penyelenggara dana kampung bila memiliki sikap yang bobrok dan integritas yang rendah hanya akan menimbulkan ketidakpuasan lain dari stakeholder.

Peningkatan Pengelolaan dana kampung yaitu dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pengelolaan dana kampung. Diharapkan dengan penerbitan kebijakan mengenai peningkatan pelayanan publik itu akan semakin mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel. mempercepat proses pelaksanaan pelayanan publik bagi stakeholder, kebijakan pemerintah dengan menerbitkan standar pelayanan minimal juga bertujuan memberikan jenis pelayanan beserta transparansi dan akuntabilitasnya kepada stakeholder. Sehingga dengan kebijakan itu, akan menghindari perilaku-perilaku menyimpang yang selama ini dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan layanan.

Dalam wawancara dengan kepala Distrik Metemani bapak ROBI TINOPI SH. Tr,. AP tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah distrik dalam peningkatan pengelolaan dana kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan beliau menyatakan sebagai berikut:

> “Upaya Menurut saya sebagai kepala Distrik Metemani dalam upaya peningkatan pengelolaan dana kampung dan meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pengelolaan dana kampung, tanpa didukung tersedianya fasilitas yang lengkap maka akan menghambat proses penyelenggaraan dana kampung tetapi kami selalu upaya dari Kampung ke Kampung untuk melakukan pelayanan yang baik agar dana kampung bisa berdampak baik kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga pembangunan yang layak bagi masyarakat kampung yang distrik metemani.

Dalam wawancara dengan kepala Kampung Bedare tentang Upaya yang

dilakukan oleh pemerintah distrik dalam peningkatan pengelolaan dana kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan beliau menyatakan sebagai berikut:

> Menurut saya upaya saya selaku kepala kampung untuk mrngelola Dana Kampung yang di berikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk dapat membangun pembagunan infrastruktur di kampung, kami namun yang saya menjabatan kepala kampung pada tahun 2019 pada tahun itu tidak tapat mencaikan dana kampung khusus buat pembamguna masyakarat karena dana yang saya cairkan itu adalah dana Covid-19 sampai sekarang ini dana kampung cairkan masih 20% covid-19 dan nanti di bulan juni baru adanya dana khuses buat pembangunan infrastruktur buat masyarakat di kampung, saya juga dana Covid-19 cuman 20% khususnya cairkan baut duda janda dan yatim piatu saja dan juga dana 80% khususnya buat pembangunan masyarakat".

Pelayanan publik sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, Tidak dapat untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyaraakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri public accuntability,dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Sangat sulit untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan, merupakan elemen pertama dalam

analisis kualitas pelayanan publik. Elemen kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu pelayanan dikenali baik sebelum dalam proses atau setelah pelayanan itu diberikan.

Pemerintah daerah, yang telah memberikan perluasan kewenangan pada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah mau tidak mau harus mampu melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, seiring dengan pelayanan yang harus disediakan. Pemberian otonomi ini, dari sisi pelayanan dipandang sebagai salah satu upaya untuk memotong hambatan birokratis yang acapkali mengakibatkan pemberian pelayanan memakan waktu yang lama dan berbiaya tinggi. Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, dalam arti lebih berorentasi kepada aspirasi masyarakat.

Dalam wawancara dengan sekretaris Distrik HAMDANI S. IP tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah distrik dalam peningkatan pengelolaan dana kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan beliau menyatakan sebagai berikut:

> "Menurut saya kami pemerintah sudah selalu menyesuaikan diri dalam upaya penigkatan pengelolaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana kampung dan pengelolaan dana yang di kelola oleh kepala kampung. Ketersediaan fasilitas kurangnya sarana dan prasarana disadari atau tidak akan semakin mempercepat sekaligus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik untuk mewujudkannya maka tentunya diperlukan alokasi dana kampung untuk penyediaan sarana dan prasarana maka segala upaya yang menghalangi penyelenggaraan pelayanan publik akan dapat teratasi tetapi kami terus-menerus berupaya melayani masyarakat kami sesuai dengan kebutuhannya masing-masing kekurangan fasilitas bukan penghalang kami untuk memberikan kualitas pelayanan publik masyarakat.

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintahan dalam pelayanan umum sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengn tujuan pendiriannya.

Penilaian tentang sama tidaknya antara harapan dan kenyataan didalam pengurusan sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan publik, apabila ditemukan ketidak samaan maka pemerintah diharapkan mampu mengoreksi keadaan agar lebih teliti dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya dipertanyakan apakah terhadap kehendak masyarakat, seperti ketentuan biaya yang tepat, waktu yang diperhitungkan dan mutu yang dituntut masyarakat telah dapat terpenuhi. Andaikata tidak terpenuhi, pemerintah diharapkan mengkoreksi keadaan, sedangkan apabila terpenuhi. dilanjutkan pada pertanyaan berikutnya, tentang informasi yang diterima masyarakat berkenaan dengan situasi dan kondisi, serta aturan yang melengkapinya.

Dalam wawancara dengan masyarakat bapak Benoni Manutune tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Distrik dalam peningkatan kualitas pengelolaan dana kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan beliau menyatakan sebagai berikut:

> “Menurut saya sebagai masyarakat tidak melihat dana kampung yang di cairkan oleh kepala kampung karena kurangnya pengawasan dari pemerintah

distrik dan dana kampung yang pemerintah pusat dan pemerintah daerah berikan selama ini dana kampung yang di kelola oleh kepala kampung selama ini tidak ada pembangunan infrastruktur yang dibangun di kampung-kampung distrik metemani.

Karena kepala kampung kurangnya kemampuan berpikir dalam pengelolaan dana kampung maupun Perkembangan internet teknologi informasi (TI) dewasa ini yang semakin pesat khususnya teknologi komputer dan jaringan internet, penetrasi internet yang dilakukan pemerintah dan telkom bahkan sudah merambah sampai kepedesaan kampung. Kemajuan teknologi ini, telah membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan yaitu telah dikembangkannya sistem pelayanan publik melalui jaringan internet yang dinamakan e-government.

Konsep e-government dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Dengan e-government maka memungkinkan terjadinya interaksi dan komunikasi baru antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya, antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antara pemerintah dengan masyarakat, dan antara pemerintah dengan dunia usaha. Oleh karena itu, penerapan e-government di sektor pemerintahan ini sangat berperan dalam mewujudkan keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik, karena dengan pelayanan yang transparan yang dapat dilihat dan dilakukan melalui internet maka masyarakat dapat mengetahui persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam mengurus sesuatu

Dalam wawancara dengan kepala Kampung Tawanggire tentang Upaya yang dilakukan oleh pemerintah distrik dalam peningkatan pengelolaan dana kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan beliau menyatakan sebagai berikut:

> "Dana Kampung yang di berikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk dapat membangun pembagunan infrastruktur di kampung saya namun yang saya menjabatan kepala kampung pada tahun 2019 pada tahun itu tidak tapat mencaikan dana kampung khusus buat pembamguna, dana yang saya cairkan itu adalah dana Covid-19 sampai sekarang ini nanti di bulan juni baru adanya dana khususnya buat pembangunan infrastruktur di kampung saya dana Covid-19 cuman 20% khususnya cairkan buat duda janda dan yatim piatu saja dana 80% khususnya buat pembangunan masyarakat".

Hasil penelitian dari pendapat masyarakat upaya peningkatan kualitas pengelolaan dana kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan di era otonomi khusus harus dilakukan secara terpadu, dengan melakukan berbagai terobosan, antara lain melalui revitalisasi, restukturisasi, dan deregulasi, peningkatan profesionalisme aparat dan partisipasi masyarakat, korparatisasi, e-government, pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat. Untuk memastikan semua ini, perlu dikembangkan pengendalian melalui pengukuran tingkat kepuasaan atas dana kampung sebagai usaha umpan balik untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan

Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan upaya peningkatan kualitas pengelolaan dana kampung juga perlu dilakukan terobosan baru melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kampung. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan dana kampung oleh aparatur, dikembangkan suatu konsepsi dengan membangun keterlibatan/partisipasi masyarakat melalui kerja sama dengan kepala Kampung yang jau dari Distrik dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik untuk membangun kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di samping

masyarakat dapat berpartisipasi penuh dan melakukan Pengawasan sosial social control. Karna di era digital ini masyarakat menuntut lebih dalam pelayanan yang efisien mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin komplek memenuhi kebutuhan hidupnya.

Membangun keterlibatan/pertisipasi masyarakat melalui kerja sama dengan kepala kampung yang jauh dari ibu kota Distrik dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik untuk membangun kreativitas dan partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan di samping masyarakat dapat berpartisipasi penuh dan melakukan pengawasan sosial kontrol. Karna di era digital ini masyarakat menuntut lebih dalam pelayanan yang efisien mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin komlek memenuhi kebutuhan hidupnya.

BAB VI
PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah Desa/Kampung Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa/Kampung Terhadap Pembangunan Desa/Kampung Di Bidang pemanfaatan dana kampung di distrik metemani kabupaten sorong selatan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Kampung Dalam pengelolaan dana kampung sudah ada tapi belum maksimal seperti yang di harapkan oleh peraturan pemerintah
2. Masih banyak kendala di kampung-kampung yang muncul akibat karena kondisi daereh yang sangat jauh dari kota kabupaten sehingga biaya operasional setiap kegiatan pembangunan mengalami peningkatan biaya yang mahal.
3. kegiatan pembangunan infrastrukur adalah sebagai kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana yaitu jalan, irigasi dan jembatan yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat kampung di distrik metemani. Perlu menjadi prioritas pemerintah distrik.

B. saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis manyarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah distrik metemani tetap berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur yang semakin baik kepada masyarakat sampai akhir periode masa jabatannya. Sesuai peraturan yang berlaku
2. Diharapkan pemerintah distrik lebih bersikap adil dan bijaksana dalam melihat

kendala di daerah terpencil dan jauh di kampung-kampung di distrik metemani kabupaten sorong selatan.

3. Diharapkan pemanfaatan dana kampung daalm pembangunan infrastruktur yang telah ada di kampung-kampung di distrik metemani, dapat di kelolah dengan baik dan efisein dan berkelanjutan sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
4. Diharapkan untuk di masa yang akan datang kegiatan pembangunan infrastruktur lebih ditingkatkan agar pendapatan/pembangunan maupun kegiatan lainnya masyarakat dapat meningkat.
5. Diharapkan masyarakat tetap aktif dalam setiap kegiatan pembangunan infratruktur karena dalam pembangunan ini masyarakat merupakan tokoh utama dalam keberhasilan suatu pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Mahmud, 2016. *Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Gandus,* Palembang

Anwar Prabu, 2011, *perilaku dan budaya organisasi, pustaka pelajar*, hal.120, Bandung.

Awang, azam. 2010. *Implementasi pemberdayaan pemerintah esa*, pustaka pelajar. Hlm 60 Yogyakarta`

Agustinus Sri Wahyudi 1996, *Manajemen Strategi, (Binarupa Aksara*, hlm: 19 Jakarta

M Kadarisman, 2013, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* Rajawali hlm.172 Rajawali Jakarta.

Yohannes Yahya, 2006 *Pengantar Manajemen, Graha Ilmu,* Hlm. 133. Yogyakarta.

Maringan Masry Simbolon 2004, *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen, Ghalia Indonesai* hlm. 62. Jekarta

Usman Effendi,2014, *Asas Manajemen, Rajawali,* Hal. Jakarta,

George R Terry, 2006, *Asas-Asas Manajemen, Cetakan* ke 5, *PT Alumni,* hal. Bandung

Sudarmanto, 2011, Kinerja dan *Pengembangan Kompetensi SDM,* Yogyakarta, , hlm.8 Pustaka Pelajar Yogyakarta

Rahajuning Tyas, 2006 *Strategi Pembangunan* Wilayah Kabupaten Situbundo Provinsi Jawa Timur.

Ginanjar Kertasasmita, 2001 *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan* dan *Pemerataan*, hlm. 2

Isbandi Rukminto Adi, 2003 *Kesejehteraan Sosial, Pembangunan* Nasional

Sutarto, 2002. *Dasar-Dasar Organisas*i, Gadjah Mada University Yogyakarta

Siagian, Sondang P., 2002. *Kiat Meningkatkan Pruduktivitas Kerja*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jekarta`

Siagian, P Sondang, 2001. *Karangka Dasar Ilmu Administrasi. Rineka* Cipta. hlm Jakarta.

Syamsir, Torang, 2014 *Organisasi & Manajemen (Perilaku,Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), Bandung: Alfbeta,* hlm, 86. Bandung

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa*

Sampara ,Lukman,2000, *Managemen Kualitas Pelayanan*, STIA LAN Press. Jakarta.

Surjadi, 2009, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik,* PT Refika Aditama, Bandung. Sampora, Lukman, 2012, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik.* Gava Media. Yogyakarta.

Sedarmayanti, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. PT Refika Aditama. Bandung.

Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Kurniawan, Agung. 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Liberty, Yogyakarta.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Undang-Undang *tersebut menekankan pada pemberian kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan.*

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 *tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat sedang berlaku sampai saat ini*.

Permendagri No. 133 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan* Desarizki Pasal 10

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 *tentang Kecamatan/Distrik disebutkan bahwa Camat dalam memimpin kecamatan bertugas*.

TRANSKIP WAWANCARA ATAU NASKAH INSTRUMENT (KUESIONER)

Mengenai: Peran Pemerintah dalam Upaya Meningkatkan kualitas pengelolaan dana kampung di Kantor Distrik Metemani Kabupaten Sorong Seletan. Pengantar, Peneliti memohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak/Ibu/saudara/saudari agar kiranya berkenan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan peneliti sesuai dengan pemahaman, pengalaman, dan pengamatan Bapak/Ibu/saudara/saudari tentang. Peran kepala Distrik dalam Meningkatkan Kualitas pengelolaan dana kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan Dengan segala hormat peneliti mengucapkan terimakasih telah menjawab pertanyaan ini:

Pertanyaan-pertanyaan:

1. Apa saja Peran Kepala Distrik dalam Pengelolaan Dana Kampung Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan.?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Distrik dalam upaya meningkatkan kualitas Pengelolaan Dana Kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan.?
3. Apa saja Hambatan Pemerintah Distrik dalam Upaya Meningkatkan Pengelolaan Dana Kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan.?
4. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Distrik dalam peningkatkan Pengelolaan Dana Kampung di Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan.?

** Terima Kasih **

[illegible]

DISTRIK METEMANI

[illegible]

SURAT KETERANGAN TELAH DILAKUKAN RISET

Nomor : [illegible]

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	ROBI TINOPI, SH.,M.Tr.AP
NIP	:	19801020 201001 1 012
Jabatan	:	KEPALA DISTRIK
Alamat Kantor	:	KANTOR DISTRIK METAMANI

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	GERSON KAWAINE
NIM	:	201993622107
Fakultas	:	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi	:	ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang Program Studi	:	SIRATA SATU (S1)

[illegible] dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul " **PERAN KEPALA DISTRIK DALAM PENGELOLAAN DANA KAMPUNG DI DISTRIK METAMANI KABUPATEN SORONG SELATAN** ". Maka, Mahasiswa yang bersangkutan sebagaimana tersebut diatas benar-benar telah melakukan Riset langsung di Kantor Distrik Metamani.

Demikian Surat Keterangan Riset ini dibuat dan diberikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metamani, 24 Mei 2023

KEPALA DISTRIK METAMANI

ROBI TINOPI, SH.,M.Tr.AP

NIP. [illegible]

DOKUMENTASI